KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Laporan Kinerja
Tahun 2024

Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan Ambon

#2024
KKP BEYOND

25 KKP

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Tahun 2024 ini telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon. LKJ Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Stasiun PSDKP Ambon pada tahun 2020-2024. Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Harapan kami, Laporan kinerja Tahun 2024 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf UPT Stasiun PSDKP Ambon dan semua pihak yang terkait.

Ambon, 20 Januari 2025
Kepala Stasiun PSDKP Ambon

Martin Yermias Lumulima,S.H.,M.Si
NIP. 19750317 200212 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Ambon telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Dalam perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Ambon terdiri dari Sasaran Kegiatan UPT Stasiun PSDKP Ambon yang bermuara pada 7 Sasaran Kegiatan yaitu: (1) Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif; (2) Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif; (3 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan; (4) Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan; (5) Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; (6)Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas; dan (7) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP . Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Kegiatan, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK). Pada Tahun 2024 terdapat 24 Indikator Kinerja pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja Stasiun PSDKP Ambon. Hal ini dikarenakan terdapat 1 indikator kinerja yang tidak digunakan dikarenakan terjadi revisi Perjanjian Kinerja. Total Nilai Kinerja Organisasi Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024 adalah 105.00 % (kategori baik) dengan total 24 Indikator Kinerja telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024

Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2024	Target DESEMBER	Capaian DESEMBER	%
Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif			**120**	
Indeks kualitas pembinaanPokmaswas (indeks)	81	81	100	120
Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif			**103,24**	
Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	91	91	95,08	104,48
Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91	91	96,67	106,23
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	100	100	100
Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan			**100**	
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100	100	100	100
Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan			**100**	
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100	100	100	100
Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan			**100**	
Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100	100	100	100
Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100	100
Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas			**100**	
Indeks Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80	80	80	100
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80	80	80	100
Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas				
Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP			**111,75**	
Nilai minimal yang Dipersyaratkan untuk membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	75	75	82,47	109,96
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	94	94	122,5	120
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80	80	95	118,75
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80	80	100	120
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	93,76	93,76	88,4	94,28
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	71	71	93,99	120
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	100	100	100	100
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	70	70	84,8	120
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	82	82	86,08	104,98
Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	84	84	86,4	102,86
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80	80	100	120

Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	70	73,58	105,11
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup Stasiun PSDKP Ambon	1	1	1	100
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80	80	96,3	120

Tercapainya IKU dan IKM sesuai dengan target yang ditetapkan, tidak terlepas dari peran serta seluruh pegawai lingkup Stasiun PSDKP Ambon, baik itu pada Stasiun, Satuan Pengawasan, maupun juga Wilayah Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon, serta Awak Kapal Pengawas yang saling mendukung dalam tercapainya target kegiatan pada Tahun 2024. Melalui Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan pada Tahun 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan..... 1
1.3. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan..... 2
1.4. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Ambon..... 3
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020–2024..... 7
2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan dan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon..... 7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN
3.1. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon..... 14
3.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon
1. IKU 1.1 Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas..... 16
2. IKU 2.1 Indeks Kinerja operasi Kapal Pengawas..... 20
3. IKU 2.2 Indeks Kinerja operasi Speedboat Pengawas..... 23
4. IKU 2.3 Presentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas..... 27
5. IKU 3.1Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan..... 30
6. IKU 4.1Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan..... 45
7. IKU 5.1 Presentase Sarana dan Prasarana pengawasan SDKP
8. yang diselesaikan 57
9. IKU 5.2 Presentase Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan..... 58
10. IKU 6.1 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan..... 61
11. IKU 6.2 Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan SDKP..... 64
12. IKU 7.1 Nilai Minimal untuk membangun unit kerja berpredikat Menuju WBK..... 67
13. IKU 7.2 Presentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko..... 68
14. IKU 7.3 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal 70
15. IKU 7.4 Indeks Profesionalitas ASN..... 71
16. IKU 7.5 Penilaian Mandiri SAKIP..... 72
17. IKU 7.6 Presentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Yang telah dilengkapi..... 74
18. IKU 7.7 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja..... 75
19. IKU 7.8 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan..... 76
20. IKU 7.9 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Stasiun PSDKP Ambon..... 78
21. IKU 7.10 Presentase Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen Pengetahuan yang terstandar..... 79
22. IKU 7.11 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP..... 80
23. IKU 7.12 Tingkat KepatuhanPengadaan barang/Jasa..... 82
24. IKU 7.13 IKPA..... 83

25. IKU 7.14 NKPA..... 84
3.3. Akuntabilitas Keuangan..... 86

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan..... 87
B. Saran..... 87
C. Rekomendasi..... 88

LAMPIRAN..... 89

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024 iii
Tabel 2.1 Pernjanjian Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024 10
Tabel 2.2 Revisi Target dan Maual IKU PK Stasiun PSDKP Ambon Desember TA.2024 13
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) + Indikator Kinerja (IK) Triwulan III Stasiun PSDKP Ambon 14
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan 2 "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif" 16
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Kegiatan 1 "Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif 17
Tabel 3.4. Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas 18
Tabel 3.5 Capaian IK 2.1 "Capaian Sasaran Kegiatan 2"Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif" 19
Tabel 3.6 Capaian lk 2.1 "Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas" 20
Tabel 3.7 Capaian IK 2.2 "Perhitungan Indeks Kinerja Kapal Pengawas Tahun 2024 21
Tabel 3.8 Capaian IK 2.2 "Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas" 24
Tabel 3.9 "Perhitungan Indeks kinerja operasi speedboat pengawas 24
Tabel 3.10 Capaian IKU 2.3 "Persentase pemenuhan logistik Kapal Pengawas" 27
Tabel 3.11 Perhitungan Indeks kinerja pemenuhan logistik Kapal Pengawas Tahun 2024 28
Tabel 3.12 Capaian Sasaran Kegiatan 3 "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan Pemanfaatan sumber daya kelautan 29
Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan 30
Tabel 3.14 Hasil Pengawasan Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah 34
Tabel 3.15 Hasil Pengawasan Konservasi 36
Tabel 3.16 Hasil Pengawasan Ruang Laut 38
Tabel 3.17 Pengawasa Jenis Ikan Dilindungi 40
Tabel 3.18 Hasil Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 42
Tabel 3.19 Hasil Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak 43
Tabel 3.20 Capaian Sasaran Kegiatan 4 "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan 45
Tabel 3.21 Capaian kinerja IKU 4.1 "Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha Dan pemanfaatan sumber daya perikanan 46
Tabel 3.22 "Hasil Pengawasan Budidaya 49
Tabel 3.23 "Hasil Pengawasan Unit Pengolahan Ikan 52
Tabel 3.24 Hasil Pengawasan Unit Pemasaran Ikan 54
Tabel 3.25 "Hasil Pengawasan Kapal Perikanan 55
Tabel 3.26 Capaian Sasaran Kegiatan 4 "Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan sarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan 56
Tabel 3.27 Capaian IKU 5.1 "Presentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan(%)" 57
Tabel 3.28 Capaian IKU 5.2 "pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP" 59
Tabel 3.29 Perhitungan Indeks Kinerja Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP 59
Tabel 3.30 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6 "Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yan tuntas 61
Tabel 3.31 "Capaian kinerja IKU 6.1 "Presentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan 61
Tabel 3.32 Perhitungan Indeks kinerja pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan" 62

Tabel 3.33 Capaian kinerja IKU 6.2 “Persentase pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan”..... 64
Tabel 3.34 Perhitungan Indeks kinerja pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan..... 65
Tabel 3.35 Capaian Sasaran Kegiatan 7 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP”..... 66
Tabel 3.36 Capaian IKU 7.1 “Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Ambon..... 67
Tabel 3.37 Capaian IKU 7.2“Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”..... 68
Tabel 3.38 Capaian IK 7.3 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP”..... 70
Tabel 3.39 Capaian IK 7.4. “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”..... 72
Tabel 3.40 Capaian IK 7.5. “Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”..... 73
Tabel 3.41 Capaian IK 7.6. “Presentase jumlah rekomendasi asil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan Disampaikan..... 74
Tabel 3.42 Capaian IK 7.7. “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”..... 75
Tabel 3.43 Capaian IK 7.7. “Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup Stasiun PSDKP Ambon”..... 77
Tabel 3.44 Capaian IK 7.9 “Indeks Kepuasan Masyrakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon..... 78
Tabel 3.45 Capaian IK 7.10 “Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen penegetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon”..... 79
Tabel 3.46 Capaian IK 7.11 ‘Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun Ambon”..... 81
Tabel 3.47 Capaian Kinerja IK 7.12 “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon..... 82
Tabel 3.48 Capaian Kinerja IK 7.13 “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon..... 83
Tabel 3.49 Capaian Kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon..... 85
Tabel 3.50.Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon Pada Triwulan III Tahun 2024..... 86

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024 5
Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Ambon 5
Gambar 3. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024 14
Gambar 4. Grafik Capaian Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas Tahun 2024 Lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP 19
Gambar 5. Kegiatan Gelar Operasi Kapal Pengawas Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024 22
Gambar 6. Capaian kinerja "Indeks kinerja operasi kapal pengawas "ligkup Eselon IV Ditjen PSDKP Tahun 2024 23
Gambar 7. Kegiatan Gelar Operasi Speedboat Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024 26
Gambar 8. Capaian kinerja "Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP 27
Gambar 9. Capaian Kinerja Indeks Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas 29
Gambar 10. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2024 32
Gambar 11. Capaian kinerja "Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang sesuai ketentuan "lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP 33
Gambar 12. Capaian kinerja persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha Perikanan lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP 46
Gambar 13. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tahun 2024 48
Gambar 14. Capaian Kinerja "Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%) lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP 58
Gambar 15. Capaian Kinerja persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP 60
Gambar 16. Capaian Kinerja "kinerja pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan Perikanan" lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP 64
Gambar 17. Capaian Kinerja " Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelatan dan perikanan 65
Gambar 18. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk membangun Unit Kerja Berpredika Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP 68
Gambar 19. Capaian Kinerja "Persentase Pelaksanaan Pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%) 69
Gambar 20. Capaian Kinerja "Nilai Pengawasan Kearsipan nternal lingkup Ditjen PSDKP"Eselon IV Ditjen PSDKP" 70
Gambar 21. Capaian "Indeks Profesionalitas ASN lingkup Eselom IV Ditjen PSDKP" 72
Gambar 22. Capaian IK 7.5. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Eselon IV Ditjen PSDP" 73
Gambar 23. Capaian Kinerja "Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yng dokumen tindak lanjutnnya telah dilengkapi dan disampaikan "lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP 74
Gambar 24. Capaian Kinerja "Nnilai Implementasi Program Budaya Kerja "lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP 76
Gambar 25. Capaian Kinerja "Inovasi Pelayanan Publik" Lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP" 77
Gambar 26. Capian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon 78
Gambar 27. Capaian Kinerja "Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Ditjen PSDKP Ambon" 80
Gambar 28. Capaian Kinerja "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP

Ambon" lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP..... 81
Gambar 29. Capaian Kinerja "Tinkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP"..... 82
Gambar 30. Capaian Kinerja "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP..... 83
Gambar 30. Capaian Kinerja "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP"..... 85

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT PSDKP merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. UPT PSDKP Ambon merupakan UPT yang ditetapkan berdasarkan KEPMEN Nomor 33/PERMEN-KP/2016 pada tanggal 28 September 2016. Stasiun PSDKP Ambon membawahi 4 (Empat) Satuan Pengawas (Satwas), yaitu: Seram Bagian Timur, Halmahera Selatan, Ternate, dan Morotai.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Stasiun PSDKP Ambon sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapainya. Pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel/efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Ambon triwulanan Tahun 2024 adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran, kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2) Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja triwulanan Tahun 2024 adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun PSDKP Ambon serta memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik di masa yang akan datang, dimulai dari proses perencanaan yang benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap triwulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik lagi.

1.3 Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain :

1. **Bidang Perikanan Tangkap**

   Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI 714, 715 dan 716) baik yang dilakukan oleh kapal ikan indonesia (KII) maupun kapal ikan asing (KIA).

2. **Bidang Perikanan Budidaya**

   a. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut
   b. Penggunaan Obat dan Pakan Ikan yang membahayakan lingkungan perairan.
   c. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.
   d. Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.

3. **Bidang Pengolahan Hasil Perikanan**

   Limbah yang dihasilkan dalam pengolahan ikan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan.

4. **Bidang Pemasaran Hasil Perikanan**

   Ikan berformalin masih ditemui di pasar-pasar tradisional.

5. **Bidang Pengawasan Ruang Laut dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

   a. Banyaknya kegiatan pemanfaatan ruang laut dan WP3K maupun reklamasi wilayah pesisir yang tidak pempunya izin dasar (PKKPRL);

   b. Kerusakan terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti bom dan racun;

   c. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

1.4 Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Ambon

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, UPT Stasiun PSDKP Ambon melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun PSDKP Ambon menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
c. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan; Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
d. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Stasiun PSDKP Ambon memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten pada bidangnya, dengan total pegawai 90 Orang Pegawai.

- **Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi ketua tim kerja dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

1. **Kepala Stasiun :**

   Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

2. **Kepala Urusan Umum:**

   Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

3. **Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran:**

   Melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

4. **Ketua Tim Kerja Prasarana dan Operasi Kapal Pengawas:**

   Melakukan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

5. **Ketua Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan SDK**

   Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring operasional kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

6. **Ketua Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan SDP**

   Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring operasional kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024

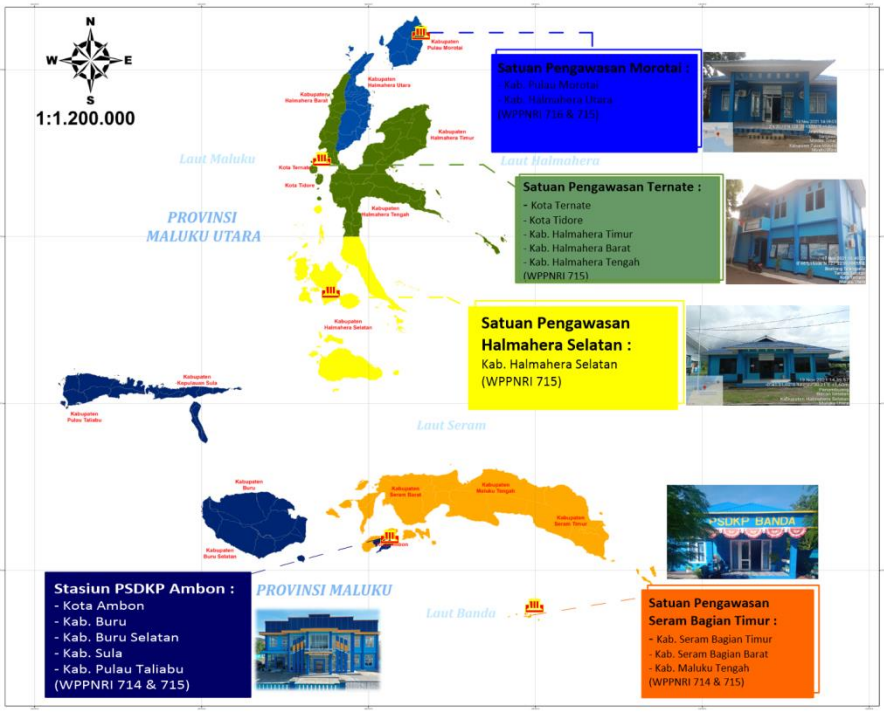

Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Ambon

2 Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Triwulan IV Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan keuangan Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari : 1) Rencana strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024; 2) Renstra Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024; 3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024; dan 4) Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon tahun 2024.

2.1 Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Renstra Ditjen PSDKP ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor : 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen PSDKP diuraikan sebagai berikut :

2.2 Visi dan Misi Stasiun PSDKP Ambon

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen PSDKP, maka dirumuskan Visi yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapain pada akhir periode perencanaan.

A. Visi

Visi Stasiun PSDKP Ambon 2020-2024 adalah “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab menuju terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi Ditjen PSDKP Ambon Tahun 2020-2024, maka di tetapkan misi Ditjen PSDKP yakni :

1. Meningaktkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab; dan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Ditjen PSDKP, maka disusunlah Visi misi Stasiun PSKDP Ambon tahun 2020-2024 : "Perairan Indonesia bebas dari *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab di wilayah kerja Stasiun PSDKP Ambon untuk mendukung Visi Direktorat Jenderal PSDKP". Untuk itu misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya Stasiun PSDKP Ambon dalam mewujudkan visi Stasiun PSDKP Ambon yakni :

1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;
2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;
3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon; dan
4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi Stasiun PSDKP Ambon maka dirumuskan beberapa Tujuan Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Ambon, yaitu:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan yang merusak lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon; dan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon.

D. Sasaran Kegiatan

Berdasarkan Tujuan Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlan Sasaran Kegiatan tahun 2020-2024 yang dirumuskan dari Sasaran Strategis Ditjen PSDKP tahun 2020-2024. Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP tahun 2020-2024 adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Stasiun PSDKP Ambon pada tahun 2020-2024 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa kegiatan yang berupa Sasaran kegiatan. Berikut Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024 :

1. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan;
2. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan;
3. Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat;
4. Terselenggaranya Pemantauan Operasi Armada PSDKP;

5. Terselenggaranya Pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP;
6. Terselenggarannya Penangananan Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan; dan
7. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Ambon

E. Perjanjian Kinerja tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Ambon memiliki Perjanjian Kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	IK.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	81
SK. 2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	IK.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	91
		IK.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	91
		IK.2.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100%
SK. 3	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	IK.3.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100

SK. 4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	IK.4.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
SK. 5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	IK.5.1	Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100%
		IK.5.2	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100%
SK. 6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	IK.6.1	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		IK.6.2	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
SK. 7	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IK.7.1	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	75
		IK.7.2	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	100
		IK.7.3	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	70
		IK.7.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	82
		IK.7.5	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Ambon	84
		IK.7.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80%

		IK.7.7	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70
		IK.7.8	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Inovasi)	1
		IK.7.9	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80
		IK.7.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	94%
		IK.7.11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80%
		IK.7.12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80%
		IK.7.13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	93,76
		IK.7.14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	71

Pada Tahun 2024 telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor B.5322/PSDKP.1/RC.210/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Revisi Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Revisi Target dan Manual IKU PK Stasiun PSDKP Ambon Desember TA. 2024

SEMULA					MENJADI				
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK. 7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	IK.7.1	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93	-	Dihapus	-	-	-
SK. 8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IK.8.1	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	75	SK. 7	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IK.7.1	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	75
		IK.8.7	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21			IK.7.7	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70
		IK.8.14	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	71			IK.7.14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	71

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id dan merupakan aplikasi berbasis informasi teknologi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon

Berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja pada Tahun 2024, Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon meliputi 7 Sasaran Kegiatan dengan 24 Indikator Kinerja. Nilai Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Sebesar 105,00 % dengan kategori hijau (baik) pada Sasaran Kegiatan Tahun 2024 (Gambar 3).

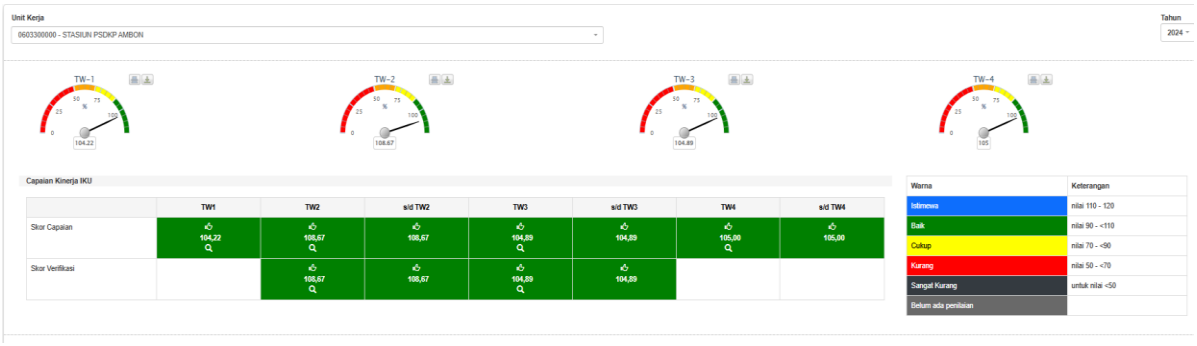

Sumber : https://kinerjaku.kkp.go.id

Gambar 3. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024

Capaian Kinerja diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh Sasaran Kegiatan yang telah di tetapkan dan menjadi kontrak kerja antara Kepala Stasiun PSDKP Ambon dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap Sasaran Kegiatan merupakan hasil perhitungan IKU dan IKM yang menjadi parameter tercapainya Sasaran Kegiatan. Capaian masing-masing Sasaran kegiatan serta IKU dan IKM dapat dilihat pada Table berikut :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) + Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024

NO		Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2024	Target DESEMBER	Capaian DESEMBER	%	Capaian s/d DESEMBER	%
S.01		**Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif**			**120**		**120**	
	IKS.01.1	Indeks kualitas pembinaanPokmaswas (indeks)	81	81	100	120	100	120
S.02		**Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif**			**103,24**		**103,24**	
	IKS.02.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	91	91	95,08	104,5	95,08	104,5

	IKS.02.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91	91	96,67	106,2	96,67	106,2
	IKS.02.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	100	100	100	200	100
S.03		**Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan**			**100**		**100**	
	IKS.03.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100	100	100	100	200	100
S.04		**Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan**			**100**		**100**	
	IKS.04.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100	100	100	100	200	100
S.05		**Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan**			**100**		**100**	
	IKS.05.1	Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100	100	100	100	100	100
	IKS.05.2	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100	100	100	100
S.06		**Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas**			**100**		**100**	
	IKS.06.1	Indeks Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80	80	80	100	80	100
	IKS.06.2	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80	80	80	100	80	100
S.07		**Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP**			**111,75**		**111,75**	
	IKS.07.1	Nilai minimal yang Dipersyaratkan untuk membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	75	75	82,47	110	82,47	110
	IKS.07.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	94	94	122,5	120	122,5	120
	IKS.07.11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80	80	95	118,8	95	118,8
	IKS.07.12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80	80	100	120	100	120
	IKS.07.13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	93,76	93,76	88,4	94,28	88,4	94,28
	IKS.07.14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	71	71	93,99	120	93,99	120
	IKS.07.2	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	100	100	100	100	100	100
	IKS.07.3	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	70	70	84,8	120	84,8	120
	IKS.07.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	82	82	86,08	105	86,08	105
	IKS.07.5	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	84	84	86,4	102,9	86,4	102,9
	IKS.07.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80	80	100	120	100	120
	IKS.07.7	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	70	73,58	105,1	73,58	105,1

	IKS.07.8	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup Stasiun PSDKP Ambon	1	1	1	100	1	100
	IKS.07.9	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80	80	96,3	120	96,3	120

Sumber : https://kinerjaku.kkp.go.id

3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon

Pada Tahun 2024, Stasiun PSDKP Ambon telah melakukan tugas dan fungsinya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Analisis pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Ambon pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

- **Sasaran Kegiatan 1 "Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif"**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 yaitu "**Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif**" diuraikan dalam 1 IKU yaitu Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas.

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan 2 "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2024	Target DESEMBER	Capaian DESEMBER	%	Capaian s/d DESEMBER	%
S.01	**Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif**			**120**		**120**	
IKS.01.1	Indeks kualitas pembinaanPokmaswas (indeks)	81	81	100	120	100	120

1. IKU 1 "Indeks Kualitas Pembinaan Pokmamswas.

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan Sistem Pengawasan SDKP berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS). Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS digunaka untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan POKMASWAS oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kegiatan pembinaan POKMASWAS dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan POKMASWAS. Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:

a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;

b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;

c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Tabel 3.3 Capaian Sasaran Kegiatan 1 " Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.01.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator kinerja ini di Tahun 2024 ditargetkan pencapaiannya sebesar 81% dan telah terealisasi 100%. Sama halnya dengan hasil capaian Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas pada Tahun 2021,2022, 2023 yaitu sebesar 100%.

Pembinaan POKMASWAS merupakan rangkaian kegiatan pemberian pembekalan, sosialisasi serta arahan bagi POKMASWAS untuk terus meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di wilayahnya.

Stasiun PSDKP Ambon melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat SDKP Melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat Tahun 2024 di beberapa lokasi antara lain:

1. Sosialisasi Pembinaan Pokmaswas oleh Stasiun PSDKP Ambon dan Komisi IV DPR RI sebagai mitra dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pulau Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku Kegiatan Pokmaswas dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pukul 08.30 WIT s/d selesai, bertempat di Aula Kantor Desa Pohea, Kec. Sanana Utara, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Peserta yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Sula, Tenaga Ahli DPRD Maluku Utara, Babinsa Sanana Utara, Babinkantibmas Sanana Utara, Kepolisian Sektor Sanana, TNI AL Sanana, Satuan POLAIRUD Polres Kepulauan Sula, Pemerintah dan Masyarakat Desa Bajo, Desa Pohea, Desa Fatcey dan Desa Fukweu, serta Pokmaswas Fatkauyon dengan Narasumber oleh Tenaga Ahli Ibu Alien Mus (Anggota Komisi IV DPR RI).
2. Sosialisasi Pembinaan Pokmaswas oleh Stasiun PSDKP Ambon dan Komisi IV DPR RI sebagai mitra dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pulau Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku Kegiatan Pembinaan POKMASWAS di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Kegiatan ini dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari Kepala Cabang Dinas Gugus Pulau VII DKP Provinsi Maluku, Pokmaswas Hasroka, Pokmaswas Pelasona dan masyarakat desa Liang. Turut hadir dan menjadi nara sumber Ibu Sa'adiah Uluputty, S.T (Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS - Dapil Maluku).

3. Sosialisasi Pembinaan Pokmaswas oleh Stasiun PSDKP Ambon dan Komisi IV DPR RI sebagai mitra dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pulau Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku Kegiatan Pembinaan Pokmaswas di Negeri Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh 100 yang merupakan Masyarakat Negeri Hatu, Pokmaswas Hasroka, Pokmaswas Pelasona, dan dihadiri oleh peserta yang terdiri dari, Cabang Dinas Gugus Pulau VII Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Danramil 1504 Leihitu, Kepala Kecamatan Leihitu Barat, Kepala Polisi Sektor Leihitu Barat, Babin POT Dirga Negeri Hatu, Kepala Desa Negeri Hatu, Ketua Jemaat GPM Negeri Hatu, Penyuluh Perikanan Leihitu Barat, sedangkan Narasumber yaitu Bapak Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si (Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Nasdem - Dapil Maluku). Kepala Stasiun PSDKP Ambon Bapak Martin Yermias Luhulima, S.H., M.Si serta Kepala Cabang Dinas Gugus Pulau VII Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Bapak Ye Muhammad Assagaf, S.Pi., M.Si. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsinya sebagai anggota Pokmaswas dengan harapan, sebagai garda terdepan didalam melihat/mendengar, mencatat dan melaporkan dalam pengawasan kelautan dan perikanan.

Tabel 3.4. Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas

No	Kegiatan	(a)	(b)	(c)
1	Pembinaan POKMASWAS Negeri Hatu Bersama Anggota DPR RI Ibu Saadiah Uluputty, ST	√	√	√
2	Pembinaan POKMASWAS Kep. Sanana Bersama Ibu Alien Mus SH	√	√	√
3	Pembinaan POKMASWAS Kab. Maluku Tengah bersama Bpk.Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.	√	√	√

Formula: $x = \frac{a+b+c}{100}$

Keterangan:
x : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS (%)
a : Rencana kerja kegiatan pembinaan (: 20)
b : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30)
c : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT lainnya maka dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas telah tercapai oleh UPT Stasiun PSDKP Kupang dan Stasiun PSDKP Cilacap bahkan melebihi dengan target yag ditetapkan yaitu sebesar 100% namun UPT Stasiun PSDKP Biak tidak melakukan perhitungan Kinerja ini pada Tahun 2024(Gambar 4).

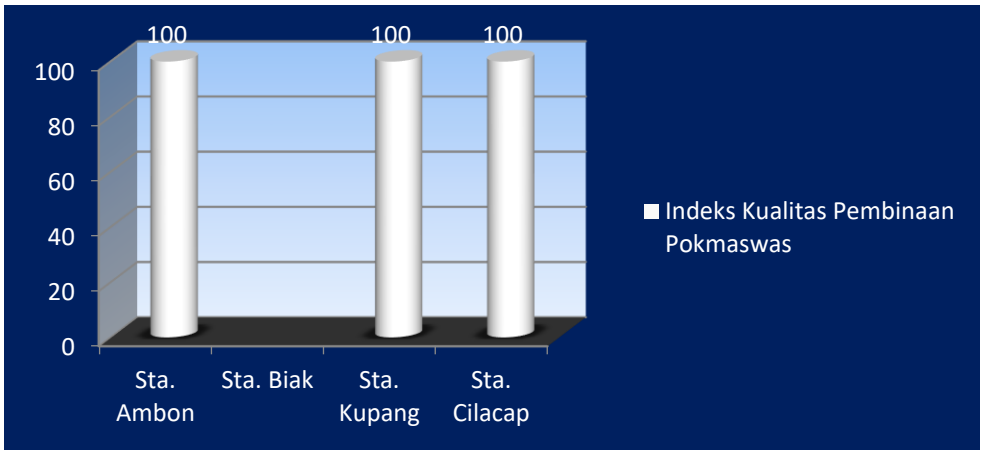

Gambar 4.Grafik Capaian Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas Tahun 2024 lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

- **Sasaran Kegiatan 2 "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif"**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2.1 yaitu "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif" diuraikan dalam 3 IKU yaitu (1) "*Indeks kinerja operasi kapal pengawas*"; (2) *"Indeks kinerja operasi speedboat pengawas"* dan (3) *"Presentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas"* adapun capaian Indikator Kinerja pada Sasaran kegiatan 2.1 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Capaian Sasaran Kegiatan 2 "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2024	Target DESEMBER	Capaian DESEMBER	%	Capaian s/d DESEMBER	%
S.02	**Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif**			**103,24**		**103,24**	
IKS.02.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	91	91	95,08	104,5	95,08	104,5
IKS.02.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91	91	96,67	106,2	96,67	106,2
IKS.02.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	100	100	100	200	100

2. IKU 2.1 "Indeks kinerja operasi kapal pengawas

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
b. Cakupan wilayah pengawasan;
c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; dan
d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Pencapaian IKU ini berdasarkan hasil perhitungan kinerja kapal pengawas HIU 13 dengan variabel pembentuk :

1. Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%) : Nilai 40
2. Cakupan Wilayah Pengawasan (40%): Nilai 40
3. Tindak Lanjut Target Operasi (15%): Nilai15
4. Hasil Dukungan Operasi Lainnya (5%) : Nilai 5

Adapun hasil perhitungan nilai Indeks kinerja kapal pengawas pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Perhitungan Indeks Kinerja Kapal Pengawas Tahun 2024

Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)	TW IV	Target	279
		Realisasi	230
		Nilai	57,71
Pemeriksaan Kelautan (30%)	TW IV	Target	7
		Realisasi	8
		Nilai	30.00
Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	TW IV	Nilai	35,08
Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	TW IV	Target	2,89
		Realisasi	4,71
		Nilai	40.00

Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	TW IV	Target	0
		Realisasi	0
		Nilai	60
Dukungan Kegiatan SAR (40%)	TW IV	Target	0
		Realisasi	0
		Nilai	40
Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	TW IV	Nilai	15
Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)	TW IV	Target	0
		Realisasi	0
		Nilai	30
Pemutusan Rumpon Ilegal (30%)	TW IV	Target	0
		Realisasi	0
		Nilai	30
Dukungan Operasi Bersama (40%)	TW IV	Target	0
		Realisasi	0
		Nilai	40
Dukungan Operasi Lainnya (5%)	TW IV	Nilai	5
Total Nilai Indeks			95,08
Nilai per Satker			**95,08**

Berdasarkan hasil kegiatan gelar operasi yang telah dilaksanakan oleh Awak Kapal Pengawas HIU 13 dengan total hari operasi 93 HO telah dilakukan pemeriksaan terhadap 230 kapal perikanan dan 8 pelaku usaha sumber daya kelautan. KP HIU 13 pada Tahun 2024 juga telah melakukan dukungan operasi bersama BAKAMLA pada bulan Juli Tahun 2024 sebanyak 40 HO yang dilaksanakan di WPPNRI 714, 715 dengan total pemeriksaan terhadap 30 Kapal Ikan Indonesia.

Nilai Capaian pada Tahun 2024 tidak tercapai secara maksimal dikarenakan capaian pemeriksaal kapal perikanan yang rendah, hal ini dikarenakan operasi kapal pengawas yang dilakukan pada Triwulan III dan IV terkendala cuaca buruk yang mengakibatkan sedikitnya kapal-kapal nelayan beroperasi. Meskipun nilai pencapaian pada Tahun 2024 tidak semaksimal nilai capaian pada Tahun 2023 tetapi keberhasilan pencapaian target operasi speedboat pengawas tidak terlepas dari peran Staf Timja Sarana dan Prasarana, Awak Kapal Pengawas HIU 13 dan juga keterlibatan Instansi terkait dalam pelaksanaan gelar operasi.

Pada Tahun 2024 capaian Indikator Kinerja Utama 2.1 " Indeks kinerja operasi kapal pengawas" telah terealisai sebesar 95,08 dari target 91 atau 104.5% (Tabel 3.4) . Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Indeks Tahun 2024 lebih tinggi dari Tahun 2020-2022 namun lebih rendah dibandingkan Tahun 2023 Table 3.5). Hal ini menjadi tolak ukur agara Indikator kinerja Operasi Kapal Pengawas harus

lebih ditingkatkan di Tahun selanjutnya dengan melakukan antisipasi apabila terjadi cuaca buruk pada saat Hari Operasi yang mengakibatkan rendahnya jumlah Kapal Perikanan yang diperiksa.

Tabel 3.7 Capaian IK 2.1 "Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.02.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	5,27	2,35	92,91	96,16	95,08

Untuk meningkatkan keterampilan Awak Kapal Pengawas, pada Tahun 2024 1 orang Awak Kapal Pengawas telah mengikuti pelatihan pemeliharaan dan perawatan Engine Caterpillar Awak Kapal Pengawas Tahun 2024 selain itu pada pertengahan Tahun 2024 Nakhoda Kapal Pengawas HIU 13 juga sudah mengikuti Uji kompetensi teknis jabatan pelaksana Nakhoda dan KKM.

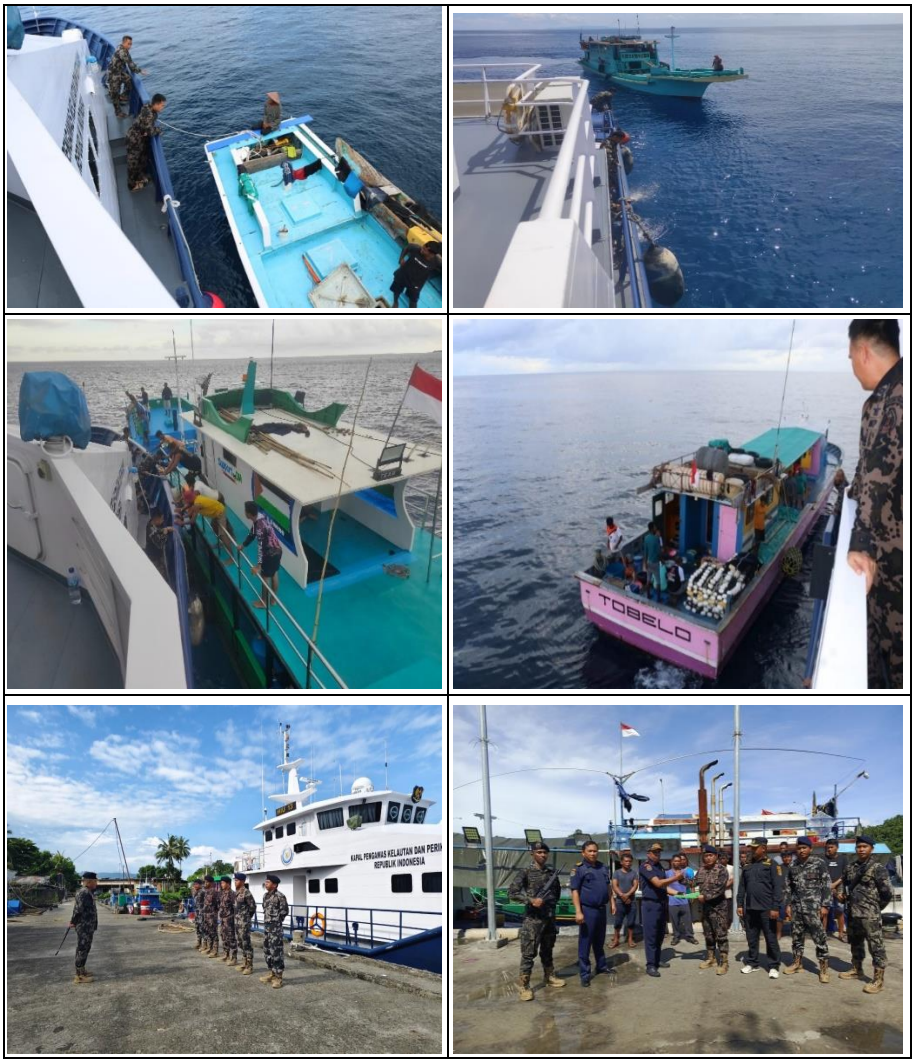

Gambar 5. Kegiatan Gelar Operasi Kapal Pengawas Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa semua UPT dapat mencapai nilai lebih dari target yang ditetapkan. UPT Stasiun PSDKP Kupang dan Cilacap dapat mencapai nilai 100 sedangkan Stasiun PSDKP Cilacap mencapai nilai 99,64 dan Stasiun PSDKP Ambon mencapai nilai 95,08 (Gambar 3.4).

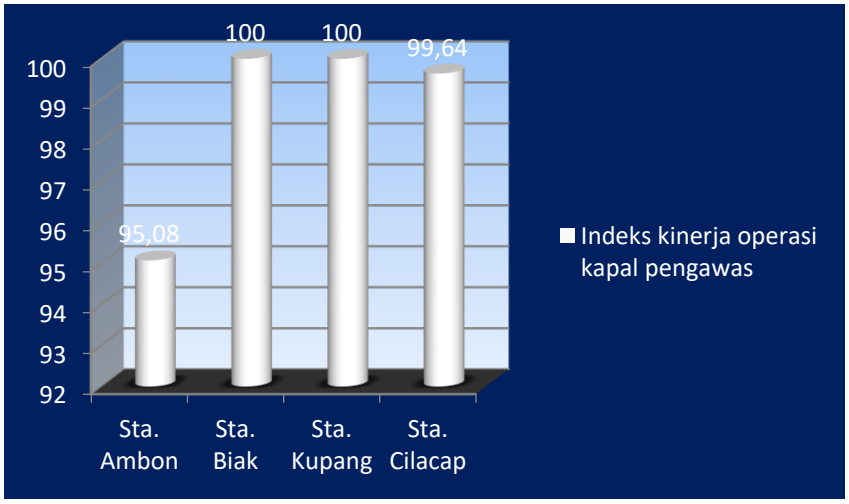

Gambar 6. Capaian kinerja "Indeks kinerja operasi kapal pengawas" lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP Tahun 2024

3. IKU 2.2 "Indeks kinerja operasi speedboat pengawas"

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
2. Cakupan wilayah pengawasan;
3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Pada Tahun 2024 capaian Indikator Kinerja Utama 3 “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas” telah terealisasai sebesar 96.67 dari target 91 atau 106.23% (Tabel 3.7).

Tabel 3.8 Capaian IK 2.2 ”Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas”

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.02.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	0,12	0,17	89,75	99,43	96,67

IKU ini ditargetkan pada Tahun 2024 sebesar 91 dan terealisasi sebesar 96,67 nilai ini lebih tinggi dari Tahun 2022 namun lebih rendah dari Tahun 2023 sehingga menjadi tolak ukur untuk dapat ditingkatkan capaiannya pada Tahun selanjutnya. Pencapaian IKU ini berdasarkan hasil perhitungan 4 unit speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Ambon :

Tabel 3.9 Perhitungan Indeks kinerja operasi speedboat pengawas

Nama Speedboat			Napoleon 40	Napoleon 51	Napoleon 55	Tenggiri
Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	TW IV	Target	23	18	31	28
		Realisasi	51	18	44	28
		Nilai	50,0	50,0	50,0	50,0
Pemeriksaan Kelautan (50%)	TW IV	Target	11	16	3	15
		Realisasi	11	93	3	15
		Nilai	50,0	50,0	50,0	50,0
Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	TW IV	Nilai	40,00	40,00	40,00	33,33
Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	TW IV	Target	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
		Realisasi	0,0006	0,0002	0,0004	0,0005
		Nilai	40,0	26,7	40,0	40,0
Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	TW IV	Target	0	0	0	0
		Realisasi	0	0	0	0
		Nilai	60	60	60	60
Dukungan Kegiatan SAR (40%)	TW IV	Target	0	0	0	0
		Realisasi	0	0	0	0
		Nilai	40	40	40	40
Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	TW IV	Nilai	15	15	15	15
Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)	TW IV	Target	0	0	0	0
		Realisasi	0	0	0	0
		Nilai	40	40	40	40
		Target	0	0	0	0

Nama Speedboat			Napoleon 40	Napoleon 51	Napoleon 55	Tenggiri
Pemutusan Rumpon Ilegal (40%)	TW IV	Realisasi	0	0	0	0
		Nilai	40	40	40	40
Dukungan Operasi Bersama (20%)	TW IV	Target	0	0	0	0
		Realisasi	0	0	0	0
		Nilai	20	20	20	20
Dukungan Operasi Lainnya (5%)	TW IV	Nilai	5	5	5	5
Total Nilai Indeks			100,00	86,67	100,00	93,33
Nilai per Satker			**96,67**			

Berdasarkan hasil perhitungan varibel pembentuk dalam perhitungan indeks kinerja speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Ambon, tak terlepas dari capaian gelar operasi yang dilaksanakan oleh speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Ambon. Pada Tahun 2024 realisasi hari operasi speedboat sebesar 148 HO dari target Hari Operasi Speedboat Tahun 2024 sebanyak 34 HO dengan total kapal yang diperiksa adalah 141 KII serta pemeriksaan kelautan sebanyak 127 yang telah direalisasikan. Pada Tahun 2024 ini, 1 unit speedboat pengawas belum secara maksimal operasi, dikarenakan speedboat tersebut (Napoleon 051) dalam keadaan tidak siap operasi terkendala oleh mesin rusak. sehingga capaian HO tidak maksimal juga terkendala dengan kegiatan docking dan cuaca buruk pada Triwulan III dan Triwulan IV, namun dapat dimaksimalkan capaian oleh 3 unit speedboat lainnya (Napoleon 040, 055 dan tenggiri) dalam melaksanakan gelar operasi.

Keberhasilan pencapaian target operasi speedboat pengawas tidak terlepas dari peran Staf Timja Sarana dan Prasarana, Operator Speedboat, Pengawas Perikanan, Pengawas Kelautan dan juga keterlibatan Instansi terkait dalam pelaksanaan gelar operasi.

Untuk meningkatkan keterampilan Awak Operator Speedboat maupun Staf Tim Kerja Sarana dan Prasarana Stasiun PSDKP Ambon, pada Tahun 2024 , 2 orang ASN telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dan 2 orang Operator Speedboat telah mengikuti kegiatan Diklat Polsus PWP3K Kelas Reguler.

Gambar 7. Kegiatan Gelar Operasi Speedboat Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon pada Tahun 2024 disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa nilai indeks kinerja UPT Stasiun PSDKP lainnya telah tercapai telah melebihi target yag ditetapkan yaitu lebih dari 95% (Gambar 7).

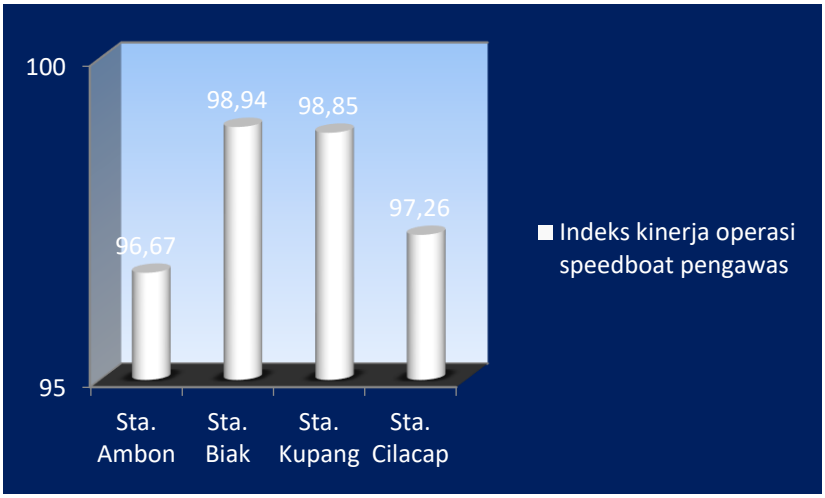

Gambar 8. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

4. IKU 2.3 "Persentase pemenuhan logistik Kapal Pengawas"

Pemenuhan logistik merupakan komponen utama dalam mendukung operasional Kapal Pengawas dalam melakukan operasi pengawasan SDKP. Tanpa adanya logistik BBM, Makanan, dan logistik lainnya tentu operasi kapal pengawas tidak dapat dilaksanakan. Pemenuhan logistik ini tidak dapat dilepaskan dengan Rencana Operasi Kapal Pengawas. Rencana Operasi erat kaitannya dengan TARGET OPERASI.

Target operasi sangat dipengaruhi oleh waktu untuk melaksanakan operasi dimaksud. Maka, peran ketersediaan logistik sangat besar. Dalam proses pemenuhan logistik dimaksud, sangat dipengaruhi oleh pihak lain secara dominan dalam hal ini PT Pertamina Patra Niaga terkait ketersediaan dan ketepatan waktu pengangkutan BBM dan adanya antrian kapal pada saat pengisian BBM. Target Presentase pemenuhan logistik kapal pengawasan pada Tahun 2024 adalah 100 dan tercapai sebesar 100 atau terealisasi sebesar 100% nilai capaian ini lebih besar dari Tahun 2022 dan sama halnya tercapai pada Tahun 2023.

Tabel 3.10. Capaian IKU 2.3 "Persentase pemenuhan logistik Kapal Pengawas"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.02.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	-	-	90	100	100

Capaian IKU ini tidak terlepas dari peran Awak Kapal Pengawas serta pegawai pada tim kerja Sarana dan Prasarana lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang bekerja keras dalam mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian IKU ini berdasarkan hasil

perhitungan kebutuhan logistik merupakan komponen utama dalam mendukung operasional Kapal Pengawas dalam melakukan operasi pengawasan SDKP (Tabel 3.10)

Tabel 3.11 Perhitungan Indeks kinerja pemenuhan logistik Kapal Pengawas Tahun 2024

Kriteria Penilaian	Jumlah Indeks Kinerja	Indeks Pemenuhan	Faktor Penghitung	Maksimal Indeks	Target	Realisasi	Rumus
					Nilai TW IV	Nilai TW IV	TW IV
1.**Bahan Bakar Minyak (BBM) (30%);**	A	B	C	D			
Pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak untuk kebutuhan Operasi Pengawasan SDKP (bulanan)							
Perhitungan:							
(3/3) x 30%	3	3	30%	100	30	30	A/B X 1 TW X C X D
2. **Pelumas (20%);**							
Pemenuhan kebutuhan Pelumas untuk kebutuhan permesin Kapal Pengawas dalam menunjang pengawasan SDKP (triwulan)							
Perhitungan:							
(1/1) x 20%	1	1	20%	100	20	20	A/B X 1 TW X C X D
3. **Bahan Makanan (25%);**							
Pemenuhan kebutuhan bahan makanan bagi awak kapal Pengawas (bulanan)							
Perhitungan:							
(3/3) x 25%	3	3	25%	100	25	25	A/B X 1 TW X C X D
4. **Air Bersih (15%);**							
Pemenuhan kebutuhan air tawar untuk keperluan sehari - hari AKP di atas kapal (bulanan)							
Perhitungan :							
(3/3) x 15%	3	3	15%	100	15	15	A/B X 1 TW X C X D
5. **Alat – Alat Pelayanan (5%)**							
Pemenuhan kebutuhan alat – alat pelayanan guna menunjang kegiatan operasional kapal (triwulan)							
Perhitungan:							
(1/1) x 5%	1	1	5%	100	5	5	A/B X 1 TW X C X D
6. Senjata Api (5%)							
Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api Periode Triwulan							
Perhitungan :							
(1/1) x 5%	1	1	5%	100	5	5	A/B X 1 TW X C X D
TARGET					**100**	**100**	

Jika nilai capaian indeks pemenuhan logistik kapal pengawas Stasiun PSDKP Ambon pada Tahun 2024 disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa UPT PSDKP lainnya (Cilacap,Kupang, dan Biak) telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan nilai capaian presentase sebesar 100% (Gambar 8).

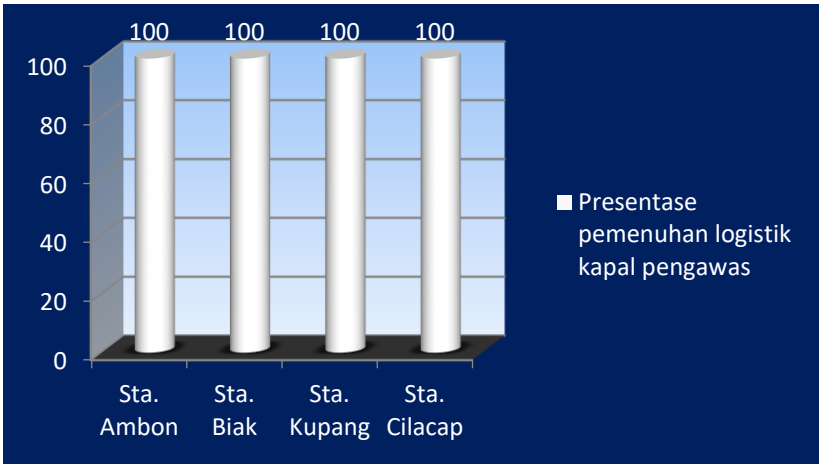

Gambar 9. Capaian kinerja "Indeks kinerja pemenuhan logistik Kapal Pengawas" lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

- **Sasaran Kegiatan 3. "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan"**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 yaitu *"Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan"* diuraikan dalam 1 IKU yaitu (1) *"Persentase penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha kelautan"* adapun capaian Indikator Kinerja pada Sasaran kegiatan 3 sebagai berikut :

Tabel 3.12 Capaian Sasaran Kegiatan 3 " Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2024	Target DESEMBER	Capaian DESEMBER	%	Capaian s/d DESEMBER	%
S.03	**Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan**			**100**		**100**	
IKS.03.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100	100	100	100	200	100

5. IKU 3.1 “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan”

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Pengawas Perikanan dan/atau Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPRL), pelaku usaha yang tidak menimbulkan pencemaran, pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi, pelaku usaha pemanfaatan pesisir (reklamasi) dan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil, pelaku usaha yang memiliki kapal perikanan dibawah 10 GT yang tidak terindikasi melakukan DF (tidak membawa bom, bius, setrum, serta ikan hasil DF). Pada Triwulan Tahun 2024 capaian IKU 5 *“Persentase penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha kelautan”* adalah 100 dari yang ditargetkan 100 atau 100% (Tabel.3.4) .

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan”

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.03.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	20	100	100	100	100

IKU ini sama pencapaiannya dengan Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023 sehingga dapat dikatakan bawa Stasiun PSDKP Ambon mampu mempertahankan capaian kinerja (Tabel 3.11). Seluruh pencapaian IKU ini tak terlepas dari polsus WP3K dan pengawas perikanan Stasiun PSDKP Ambon yang bersinergi bersama instansi terkait seperti Dinas Keluatan dan perikanan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Loka PSPL Sorong Satker Ternate dan Ambon, Polair, TNI AL yang turut andil bersama-sama menertibkan peraturan perundang-undangan bagi para pelaku usaha yang bergerak dibidang kelautan dalam hal ini memberikan dampak langsung terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaan kegiatan IKU ini juga tidak dipungkiri mendapatkan banyak tantangan dilapangan yakni jarak tempuh ke lokasi yang sebagian besar merupakan daerah kepulauan.

Untuk meningkatkan keterampilan pengawas kelautan dalam menunjang kegiatan pengawasan kelautan, 2 orang ASN telah mengikuti Pelatihan dan sertifikasi Drone di Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi, 5 orang ASN Pengawas Kelautan telah mengikuti Diklat Polsus PWP3K di Satlat Brimob Cikeas Bogor, 1 orang ASN pengawas kelautan telah mengikuti kegiatan pelatihan perhitungan valuasi kerusakan Sumber Daya Kelautan di Kepulauan Seribu, serta 2 orang ASN pengawas kelautan telah mengikuti Pelatihan Dasar Intelijen Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2024 di Pusat Pendidikan (Pusdik) Intelijen.

Ukuran keberhasilan IKU *"Persentase penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha kelautan"* diperoleh dari 6 komponen kegiatan pengawasan sumber daya kelautan yakni :

a) Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
b) Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya;
c) Unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya;
d) Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya;
e) Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya; dan
f) Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak.

(Gambar 9).

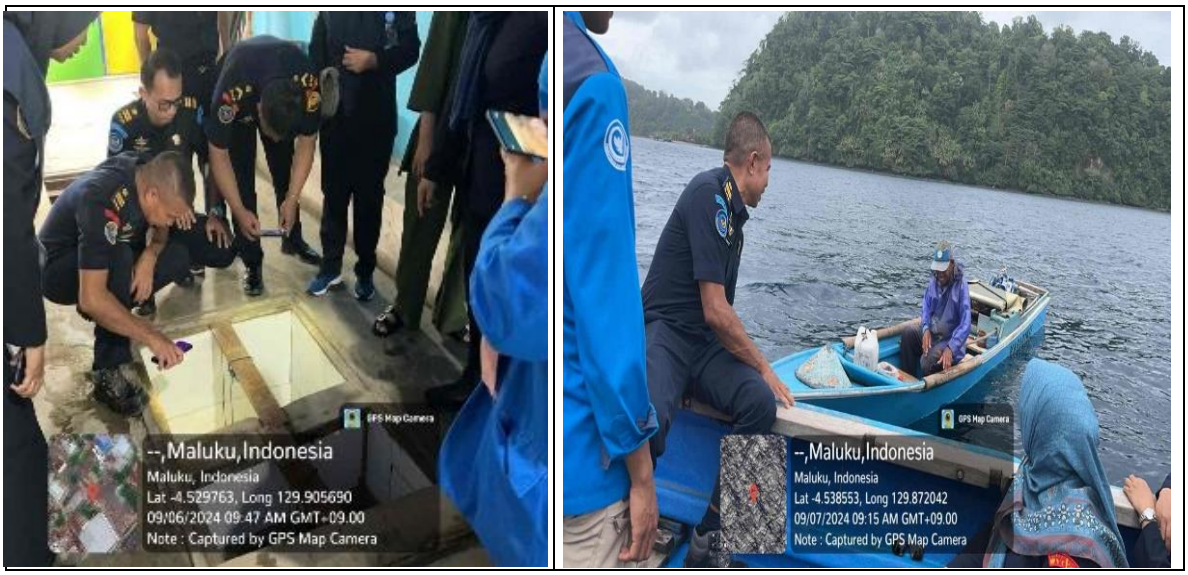

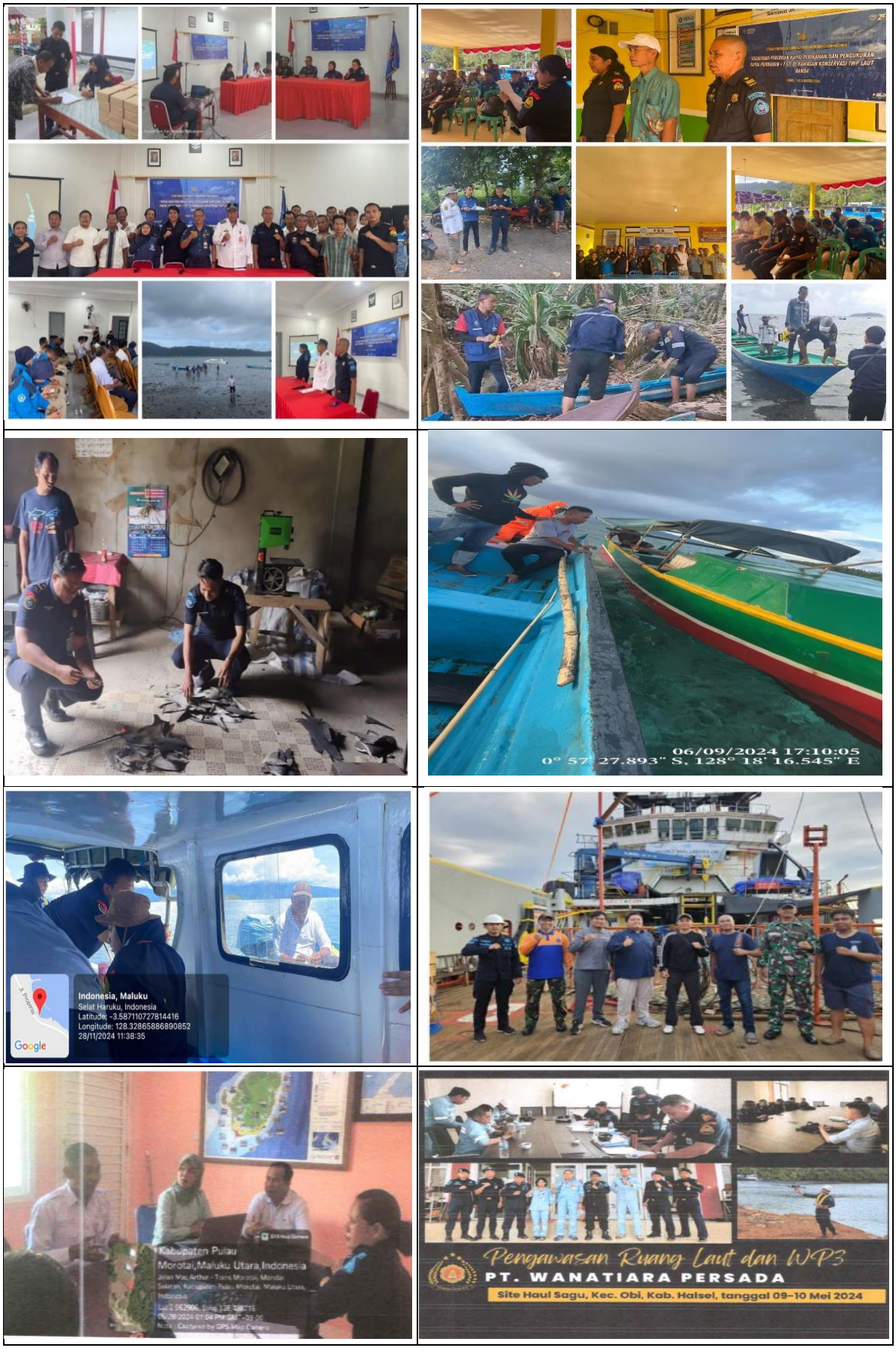

Gambar 10. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2024

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan semua UPT PSDKP telah tercapai sesuai dengan target yag ditetapkan (Gambar 10).

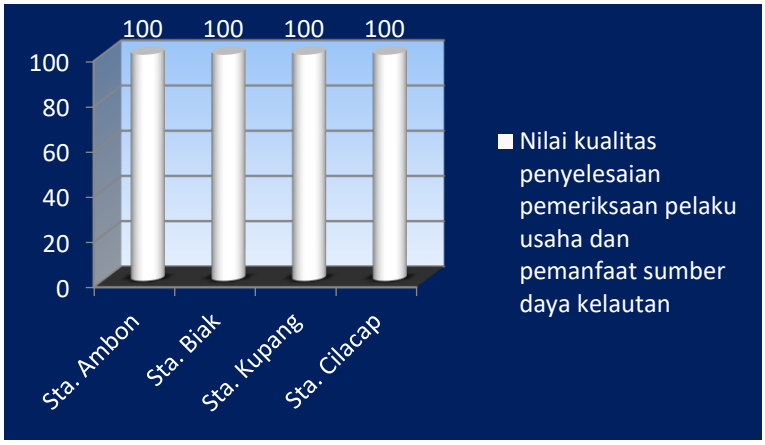

Gambar 11. Capaian kinerja "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan"" lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

❖ **6 Kegiatan pembentuk IKU Pengawasan Sumber Daya Kelautan**

1. **Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya**

Pengawasan utama yang dilakukan adalah pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan yakni meliputi pemeriksaan dokumen perizinan, sarana dan prasarana, serta instalasi pengolahan air limbah. Parameter pengukuruan terdiri dari :

- Memiliki dokumen pencegahan pencemaran (persetujuan lingkungan/ AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lainnya);
- Memiliki IPAL/Alat pencegahan pencemaran;
- Kesesuaian pelaksanaan pencegahan pencemaran dengan dokumen pencegahan pencemaran (IPAL/Alat pencegahan pencemaran terpasang dan beroperasi).

Tahun 2024 pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya telah diperiksa sebanyak 30 Pelaku Usaha. Pada Tahun 2024 dilakukan pemeriksaan pencemaran perairan detil kegiatannya ada pada Tabel 3.12.

Tabel 3.14 Hasil Pengawasan Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah

No.	Tanggal Pengawasan	Pelaku Usaha	Alamat	Titik Koordinat
1	13 Maret 2024	PT. Aneka Sumber Tata Bahari	JL.Hurnala 2 Negeri Tulehu, Kec. Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	3°34'53.976'' LS - 128°19'35.040'' BT
2	14 Maret 2024	PT. Maluku Prima Makmur (MPM)	Jl. Dr. J.Leimena No.8A, Desa/Kelurahan Tawiri, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku	3°69'03.57'' LS - 128°11'21.97'' BT
3	14 Maret 2024	PT. Maluku Prima Sukses	Jl. Trans, Negeri Ureng, Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah	3°66'64.48'' LS - 127°95'11.44'' BT
4	18 Maret 2024	PT. Peduli Laut Maluku	ln. Raya Tulehu, Dusun Mamokeng, Negeri Tulehu	3°58'73.67'' LS - 128°33'04.08'' BT
5	20 Maret 2024	PT. Harta Samudera	Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Tantui RT.001/01 Sirimau Kota Ambon, Prov. Maluku	-3°67'73.04'' S - 128°18'88.88'' E
6	21 Maret 2024	PT. Mina Maluku Sejahtera	PPI Eri, Dusun Eri RT 007/002 Negeri Nusaniwe Kec. Nusaniwe Kota Ambon Prov. Maluku	-3°76'18.36'' S - 128°12'48.12'' E
7	22 Maret 2024	PT. Perikanan Indonesia	Jln. Kapten Piere Tandean Desa/Keluragan Galala, Kec. Sirimau Kota Ambon Prov. Maluku	3°39'50.88'' S - 128°12'4.90'' E
8	22 Maret 2024	PT. Kreasi Himono Indonesia	PPI Eri, Dusun Eri RT 007/002 Negeri Nusaniwe Kec. Nusaniwe Kota Ambon Prov. Maluku	03°45'42.30'' S - 128°07'27.84'' E
9	15 Mei 2024	CV. Advani Bintang Samudra	Jln. Sultan Hasanuddin, Desa Pandan Kasturi, 'Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	3°40'33.15"S, 128°11'21.16"E
10	15 Mei 2024	PT. Intimas Surya	Jln. Sultan Hasanuddin, Desa Pandan Kasturi, 'Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	3°6'76.65'' LS - 128°1'89.72'' E
11	15 Mei 2024	CV. Maluku Fortuna	Jln. Sultan Hasanuddin, Desa Pandan Kasturi, 'Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	3°40'33.29"S, 128°11'21.88"E
12	17 Mei 2024	PT. Tri Satria Samudra	Jln. Sultan Hasanuddin, Desa Pandan Kasturi, 'Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	3°6763143'' LS - 128°1891518'' E
13	17 Mei 2024	CV. Harta Laut Cemerlang	Jln. Sultan Hasanuddin, Desa Pandan Kasturi, 'Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	3°40'32.51'' S - 128°11'20.76'' E
14	17 Mei 2024	PT. Asmin Jumahir Sejahtera	Jln. Sultan Hasanuddin, Desa Pandan Kasturi, 'Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	3°40'36.08'' S - 128°11'23.24'' E
15	20 Mei 2024	PT. Mina Usaha Harapan	Jln. Sultan Hasanuddin, Desa Pandan Kasturi, 'Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	3°40'33.9888'' LS - 128°11'23.1756'' BT

16	20 Mei 2024	Firma Sanu	Jln. Sultan Hasanuddin, Desa Pandan Kasturi, 'Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	3°40'37.51'' LS - 128°11'21.71'' BT
17	27 Mei - 02 Juni 2024	PT. Harta Samudera	Desa Daeo, Kec. Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara	2.062919 LS – 128.488707 BT
18	27 Mei - 02 Juni 2024	PT. Morotai Marine Culture	Pulau Ngele Ngele, Kec. Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara	2.203210 LS - 128.212497 BT
19	27 Mei - 02 Juni 2024	CV. Markindo Raya	Desa Pale, Kec. Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara	'1.669385 LS - 127.994121 BT
20	20-Agu-24	PT. Lautan Bahari Sejahtera	'Jalan Raya Suli Atas Negeri Suli, Desa/Kelurahan Suli, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku	'-3.616407 LS - 128.320280 BT
21	20-Agu-24	CV. Mitra Tuna Mandiri	'Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate, Desa Bastiong Talangame, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	'00°46'05."S - 127°22'39"E
22	24-Agu-24	PT. Amirta Mustika Sari	'Jl. Pantai, RT.06, Desa/Kelurahan Ampera, Kec. Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	'-3.29616 LS - 128.093 BT
23	05 - 08 September 2024	PT. Harta Samudera	'Negeri Administratif Kampung Baru, Desa/Kelurahan Nusantara, Kec. Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	'-4.529872 LS - 129.905919 BT
24		CV. Inti Samudera Dzathaam	'Desa Dwiwarna, Kel. Dwiwarna, Kec. Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	'-4.529739 LS - 129.899529 BT
25		CV. Mitra Nelayan Pesisir	'Gunung Api, Desa Nusantara, Kec. Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	'-4.518665 LS - 129.890600 BT
26	05 September 2024	PT. Perikanan Indonesia (Persero) Cab. Bacan	'Desa Panamboang, Kec. Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	'00°41'31,204"S - 127°27'20,224"E
27	02 - 05 Oktober 2024	PT. Wahana Lestari Investama	'Desa Opin, Kec. Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	'2.55'16'' LS – 129.13'58'' BT
28	30 Oktober 2024	PT. Lumbung Ikan Maluku	'Jl. Laksamada Leo Wattimena, Desa/Kel. Negeri Lama Kec. Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku	'-2°62'82.66'' LS – 129°23'66.89'' BT
29	05/11/2024	PT. Celebes Ocean Fisheries	'Desa Waai, Kec. Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	'-3.56967 LS - 128.32277 BT
30	11/11/2024	PT. Mitra Nelayan Mandiri	'Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate, Desa Bastiong Talangame, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	'00°46'8."S - 127°22'41"E

2. Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya

Pengawasan kawasan konservasi yang dilakukan oleh Pengawas Kelautan dan Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon ditargetkan pada Kawasan Konservasi Nasional TWP Laut Banda. Dalam melakukan kegiatan pengawasan kawasan konservasi perairan target pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan kelautan dan perikanan di kawasan konservasi nasional TWP Laut banda. Adapaun kegiatan tersebut terdiri dari :

- penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi
- pembudidayaan ikan
- penelitian, dan pendidikan
- kegiatan pariwisata alam perairan
- pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar dan penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan
- pendirian dan/atau penempatan bangunan laut
- penempatan instalasi di laut
- pemanfaatan air laut selain energi
- pembuatan foto, film dan video komersial
- landin*g, take off*, dan *taxiing seaplane*

Parameter verifikasi pelaku usaha pada kawasan konservasi yakni:

- Memiliki dokumen perizinan (TDUP/TDKP/ NIB/Surat izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi untuk pengusahaan pariwisata alam perairan/Surat izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap /SIUP/dokumen lainnya). Sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan wilayah konservasi di Triwulan III, Stasiun PSDKP Ambon bekerja sama dengan KSOP Kelas I Ambon telah melakukan kegiatan Sosialisasi dan Pengukuran Kapal Perikanan untuk 104 nelayan yang ada di Kecamatan Banda dan Kecamatan Kepulauan Banda. Hasil pengukuran trersebut telah digunakan sebagai *data based* dalam pembuatan dan penerbitan 88 TDKP nelayan yang rencananya akan diserahkan pada Tahun 2025.
- Kesesuaian zonasi kegiatan pelaku usaha di dalam kawasan konservasi perairan. Pada Tahun 2024 telah dilakukan pengawasan kawasan konservasi perairan sejumlah 38 Pelaku Usaha.

Tabel 3.15. Hasil Pengawasan Konservasi

No.	Tanggal	Nama Pelaku Usaha	Alamat	Zona	Dokumen Perizinan (Nomor Dokumen)
1	29 - 30 Januari 2024	Japri Djali	Desa Pulau Rhun, Kec. Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	No. TDKP : 45.21.8197.77.00099
2		Herdin La Raru	Desa Kampung BaruKec. Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	Masih dalam proses penerbitan izin Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku
3		Elvis Rahayaan	Desa Kampung BaruKec. Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	Masih dalam proses penerbitan izin Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Maluku

4	22 - 23 Februari 2024	Anto	Desa Walling - Spanciby, Kec. Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	-
5		Alfaris	Desa Boiyau, Kec. Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	-
6		Bukhori	Desa Walling - Spanciby, Kec. Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	-
7		Iwan	Desa Kampung BaruKec. Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	Masih dalam proses penerbitan izin Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Maluku
8	25 - 26 Maret 2024	Aswan	Desa Boiyau, Kec. Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	-
9		Marwan	Desa Kampung BaruKec. Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	-
10		Jafri Jali	Desa Pulau Rhun, Kec. Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	45.21.8197.77.0.0099
11		Mustafa	Desa Pulau Rhun, Kec. Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	Masih dalam proses penerbitan izin Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Maluku
12		Elfis Rahayaan	Desa Kampung BaruKec. Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	Masih dalam proses penerbitan izin Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Maluku
13		Fata Maidi	Desa Lautang Kec. Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	0127/TDKP/GP.VI/V/2021
14		Rakiman Basiman	Desa Lautang Kec. Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	0147/TDKP/GP.VI/V/2021
15		Mustakim Saiman	Desa Lautang Kec. Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	0029/TDKP/GP.VI/V/2021
16	15 Mei 2024	Rusdi Laucen	Desa Lautang Kec. Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	B81000946
17		Ruslan	Desa Kampung BaruKec. Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	-
18	11 - 12 Juli 2024	Tendri Tayib	Desa Pulau Rhun, Kec. Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	TDKP : 45.21.8197.625.00119
19		Anhar Adjis	Desa Kampung Baru, Kec. Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	TDKP : 46.22.8197.625.00371 NIB : 1306220070773
20		Arjali Basiman	Desa Lautang, Kec. Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	TDKP : B81000918
21	18 - 23 Agustus 2024	Hanan	Desa Kampung Baru Kec. Banda , Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	-
22		Abdula	Desa Kampung Baru Kec. Banda , Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	-
23		Taip	Desa Kampung Baru Kec. Banda , Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	-
24		Muhammad	Desa Kampung Baru Kec. Banda , Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	-
25		Eckram	Desa Selamon Kec. Kepulauan Banda , Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	-
26	05 - 08 September 2024	Ahmad Syarif	Desa Negeri Merdeka, Kec. Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	
27		Supriadi Bugis	Desa Kampung Baru Kec. Banda , Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	B81000987

28	31 Oktober - 1 November 2024	Usra Sakmad	Desa Merdeka, Kec. Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	B1000953
29	31 Oktober - 1 November 2024	Musliadi Misran	Desa Lautang Kec. Kepulauan Banda , Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	B81000942
30		Rasid	Desa Nusantara, Kec. Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	46.22.8197.56.00476
31		Efendi Umar	Desa Kampung Baru Kec. Banda , Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	
32	21 - 23 November 2024	Jeni Baani	Desa Waling Spanciby, Kec. Kepulauan Banda , Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	B81000931
33		Agil Idris	Desa Negeri Kampung Baru Kec. Banda , Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	46.22.8197.77.00445
34		Baharudin Basiman	Desa Lautang Kec. Kepulauan Banda , Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	46.22.8197.625.00498
35		Irianto Kempa	Desa Waer, Kec. Kepulauan Banda , Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	46.22.8197.625.00410
36		Asdir Djiman	Desa Waer, Kec. Kepulauan Banda , Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	B81000919
37		Musliadi Misran	Desa Lautang Kec. Kepulauan Banda , Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	46.22.8197.625.00487
38		Irman Djiman	Desa Lautang Kec. Kepulauan Banda , Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Zona Pemanfaatan	B81000930

3. Unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya

Pada Tahun 2024 target pengawasan unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya oleh Pengawas Kelautan Stasiun PSDKP Ambon dengan Parameter pemeriksaan yakni :

- Memiliki dokumen KKPRL
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan

Pada Tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadapa 20 pelaku usaha. Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tabel 3.16. Hasil Pengawasan Ruang Laut

No	Tanggal Pelaksanaan	Pelaku Usaha	Izin KKPRL	NO. KBLI	Titik Koordinat	Luas
1	20 -24 Februari 2024	PT. Kusu Island Resort	1108231051820000 0	KBLI 56101 - Restoran	$0^{0}27'30.69"S$ - $127^{0}42'36.14"E$	7,8 Ha

2		PT. Proco Island Bambu Resort	7042210218204010	KBLI 55110 - Hotel Bintang	0⁰24’20.01”S - 127⁰43’22.64”E	5.500 M²
3		PT. International Nabucco Resort	-	-	0⁰27’10.77”S -127⁰42’7.72”E	-
4		PT. Sali Bay Resort	2082310518200020	KBLI 55110 - Hotel Bintang	0⁰25’44.94”S - 127⁰44’26.31”E	0,3 Ha
5	25 -29 Februari 2024	PT. Nusa Karya Arindo	14072310518200000	KBLI 07295 - Pertambangan Bijih Nikel	0°88'95.36'' S - 128°29'82.22'' E	48,82 Ha
6		PT. Sumberdaya Arindo	14072310518200000	KBLI 07295 - Pertambangan Bijih Nikel	0°83'72.21'' S - 128°26'19.68'' E	30 Ha
7		PT. Antam UBPN Maluku Utara	14072310518200000	KBLI 07295 - Pertambangan Bijih Nikel	0°87'36.84'' S - 128°28'54.20'' E, 0°78'71.11'' S - 128°32'44.29'' E	46,09 Ha
8		PT. Feni Halmahera Timur	14072310518200000	KBLI 52221 - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut	0°83'71.55'' S - 128°25'01.35'' E	36,95 Ha
9	1-3 April 2024	PT. Sambaki Tambang Sentosa	0220003693608		0°54'34.362''N - 128°20'42.540'' E	± 0,9 Ha
10		PT. Alam Raya Abadi	8120110251277		0°7'25.36''N - 128°4'32.55'' E	± 0,54 Ha
11	6 - 10 Mei 2024	PT. Wanatiara Persada	8120200812791		1°29'18.498''S - 127°23'21.243'' E	12,95 Ha
12		PT. Rimba Kurnia Alam	8120200812791		1°28'10.771''S - 127°25'45.753'' E	3 Ha
13	26 - 29 Mei 2024	PT. Trimegah Bangun Persada Tbk	9120003410228	KBLI 68130	1°32'2.717''S - 127°24'29.07'' E	1. 24.47 Ha 2. 15.91 Ha 3. 167.4 Ha 4. 240.22 Ha 5. 11.96 Ha 6. 9.63 Ha 7. 131.2 Ha 8. 13.03 Ha 9. 18.26 Ha 10. 100 Ha
14	27 Mei - 02 Juni 2024	PT. Morotai Marine Culture	8120104922208	KBLI 03215	2°12'10.56''S - 128°12'44.13'' E	11.65 Ha
15		PT. Natural Indococonut Organik	9120102681301		1.622639 S - 127.989421 E	14 Ha
16		PT. Harta Asia Pasifik	9120408801745		2°0'58.99''S - 128°16'53.77'' E	708 Ha
17	19 Juni 2024	Mangrove Dewa Cafe and Resto	-		3°65'72.23''S - 128°21'43.40'' E	0.046 Ha

18	04 - 06 September 2024	PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP)	8120315042745	KBLI 68130	'-0°28'7.809''S - 127°57'48.413'' E	672.71 Ha
19	25 - 26 September 2024	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sofifi	-	-	'-00°44'10''LU - 127°33'10'' BT	'0.29066 Ha
20	15 - 25 Oktober 2024	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk	2203241051820000 0	611000	0°38.'34.388''LS - 127°28'43.404''BT dan 1°31.'28.492''LS - 127°24'22.563''BT	118.1 KM

4. Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya

Pada Tahun 2024 target pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya yakni sebanyak 3 pelaku usaha. Parameter verifikasi pelaku usaha terdiri dari :

- Memiliki dokumen perizinan (SIPJI/ SAJI)
- Memiliki kuota penangkapan dan eksport untuk kegiatan penangkapan/ pengambilan dan perdagangan luar negeri
- Kesesuaian pelaksanaan usaha dengan izin yang dimiliki
- Kesesuaian jenis ikan

Pada Tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 pelaku usaha yaitu CV Rumatiga Empat Saudara, UD Aprilia Samudra, UD Alinaa, UD Raffa Seafod dan CV. Aprilia Samudra Bahari yang dilaksanakan oleh Pengawasan Kelautan dan Perikanan Stasiun PSDKP Ambon. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut :

Tabel 3.17 Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	PELAKU USAHA	SIPJI	SAJI	KBLI	ALAMAT LOKASI	JENIS IKAN
1	19 Januari 2024	CV. Rumatiga Empat Saudara	174/I/KKP/2021	00250/DN/LPSPL.1/I/2024	KBLI : 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan	Jl. Jenderal Sudirman, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku	1. Hiu Lanjaman, Merak Bulu, Hiu Karang Sirip Hitam, Hiu Kejen,Lanjaman,Merak Bulu, Hiu Kerba, Hiu Buas,Hiu Bujit, Hiu Karet, Hiu Mangiwang, Hiu Lanjaman Karang, Hiu Sonteng
2	22 - 26 April 2024	UD. Aprillia Samudra	40/1/KKP/2021	00053/SAJI/DN/LPSPL.1/I/2024; 00290/SAJI/DN/LPSPL.1/II/2024	1. KBLI : 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan 2. KBLI : 03151- Penangkapan/pengambilan ikan bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/ atau termasuk dalam Appendiks CITES	Jl. Syahril - Geser, Desa Geser, Kec. Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku	Hiu Sutra

3		UD. Alinaa	34/1/KKP/2021	00469/SAJI/DN/LPSPL.1/II/2024; 00812/SAJI/DN/LPSPL.1/IV/2024	1. KBLI : 47245 - Perdagangan Eceran daging dan ikan olahan 2. KBLI : 03151- Penangkapan/pengambilan ikan bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/ atau termasuk dalam Appendiks CITES	Negeri Administratif sesar, Desa Sesar, Kec. Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku	Hiu Sutra
4	20 September 2024	UD. Raffa Seafood	14/I/KKP/2020	1. 01435/SAJI/DN/LPSPL.1/VIII/2024 2. 01531/SAJI/DN/LPSPL.1/VIII/2024 3.01609/SAJI/DN/LPSPL.1/IX/2024	1. KBLI : 03151- Penangkapan/pengambilan ikan bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/ atau termasuk dalam Appendiks CITES 2. KBLI : 03111 - Penangkapan Pisces/ Ikan Bersirip di Laut 3. KBLI : 47215 - Perdagangan Enceran Hasil Perikanan	Jln. Pelabuhan Kupal, Desa Kupal, Kec. Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	Hiu Sutra
5	31 Oktober 2024	CV. Aprillia Samudra Bahari	40/1/KKP/2021	1. 00971/SAJI/DN/LPSPL.1/V/2024 2. 01513/SAJI/DN/LPSPL.1/VIII/2024	1. KBLI : 03151- Penangkapan/pengambilan ikan bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/ atau termasuk dalam Appendiks CITES 2. KBLI : 03116 - Penangkapan Echinodermata di Laut 3. KBLI : 47215 - Perdagangan Enceran Hasil Perikanan	Jl. Ir. M. Putuhenna, Desa Rumah Tiga, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku	Hiu Sutra

5. Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya

Pada Tahun 2024 pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya oleh Pengawas Kelautan dan Pengawas Perikanan. Pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil fokus pada kegiatan reklamasi maupun pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pemanfaatan oleh PMA dan/atau PMDN meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Pariwisata
- Budidaya Laut
- Usaha perikanan dan kelautan
- Industri perikanan secara lestari
- Pertanian
- Peternakan
- Usaha lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

Parameter verifikasi pelaku usaha:

- Memiliki dokumen perizinan (NIB/Rekomendasi pemanfaatan PPK di bawah 100 km2/Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil dan perairan Disekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing/dokumen lainnya)
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan
- Kesesuaian luasan dan titik koordinat dengan dokumen perizinan

Pada Tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya sebanyak 13 Pelaku Usaha.

Tabel 3.18 Hasil Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Tanggal Pelaksanaan	Pelaku Usaha	Izin KKPRL	NO. KBLI	Titik Koordinat	Luas
1	25 -29 Februari 2024	PT. Nusa Karya Arindo	14072300000000000	KBLI 07295 - Pertambangan Bijih Nikel	0°88'95.36'' S - 128°29'82.22'' E	48,82 Ha
2		PT. Sumberdaya Arindo	14072300000000000	KBLI 07295 - Pertambangan Bijih Nikel	0°83'72.21'' S - 128°26'19.68'' E	30 Ha
3		PT. Antam UBPN Maluku Utara	14072300000000000	KBLI 07295 - Pertambangan Bijih Nikel	0°87'36.84'' S - 128°28'54.20'' E, 0°78'71.11'' S - 128°32'44.29'' E	46,09 Ha
4		PT. Feni Halmahera Timur	14072300000000000	KBLI 52221 - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut	0°83'71.55'' S - 128°25'01.35'' E	36,95 Ha
5	1-3 April 2024	PT. Sambaki Tambang Sentosa	0220003693608		0°54'34.362''N - 128°20'42.540'' E	± 0,9 Ha
6		PT. Alam Raya Abadi	8120110251277		0°7'25.36''N - 128°4'32.55'' E	± 0,54 Ha
7	6 - 10 Mei 2024	PT. Wanatiara Persada	8120200812791		1°29'18.498''S - 127°23'21.243'' E	12,95 Ha
8		PT. Rimba Kurnia Alam	8120200812791		1°28'10.771''S - 127°25'45.753'' E	3 Ha
9	26 - 29 Mei 2024	PT. Trimegah Bangun Persada Tbk	9120003410228	KBLI 68130	1°32'2.717''S - 127°24'29.07'' E	1. 24.47 Ha 2. 15.91 Ha 3. 167.4 Ha 4. 240.22 Ha 5. 11.96 Ha 6. 9.63 Ha 7. 131.2 Ha 8. 13.03 Ha 9. 18.26 Ha 10. 100 Ha
10	27 Mei - 02 Juni 2024	PT. Morotai Marine Culture	8120104922208	KBLI 03215	2°12'10.56''S - 128°12'44.13'' E	11.65 Ha
11		PT. Natural Indococonut Organik	9120102681301		1.622639 S - 127.989421 E	14 Ha
12		PT. Harta Asia Pasifik	9120408801745		2°0'58.99''S - 128°16'53.77'' E	708 Ha
13	19 Juni 2024	Mangrove Dewa Cafe and Resto	-		3°65'72.23''S - 128°21'43.40'' E	0.046 Ha

6. Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak.

Pada Tahun 2024 target pengawasan unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak oleh Pengawas Kelautan dan Pengawas Perikanan. Destructive fishing adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat/bahan yang merusak (bom ikan/racun ikan/setrum ikan). Kegiatan pengawasan ditargetkan pada Kapal perikanan dibawah 10 GT yang diperiksa dan tidak membawa alat/bahan dan/atau hasil tangkapan yang berasosiasi dengan destructive fishing (DF). Parameter verifikasi: Tidak menggunakan dan/atau memiliki bom ikan/racun ikan dan setrum ikan. Pada Tahun 2024 telah dilakukan pengawasan unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak sebanyak 37 pelaku usaha. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut :

Tabel 3.19 Hasil Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak.

No	Tanggal Pelaksanaan	Penanggung Jawab Kapal/Pemilik	GT	Alat Tangkap	Lokasi Penangkapan
1	02 - 03 Mei 2024	Bapak Amir	3 GT	Pancing Tonda	0°55'41.3'' N - 127°29'03.1'' E
2		Bapak Yunus	3 GT	Hand Line	0°53'57.5'' N - 127°29'18.2'' E
3		Bapak Abdulah	3 GT	Pancing Dasar	0°55'04.0'' N - 127°29'16.1'' E
4		Bapak Ali	2 GT	Hand Line	0°57'41.5'' N - 127°30'13.5'' E
5	19 Februari 2024	Bpk.Edy	1 GT	Hand Line	1°56.590' N - 127°28.099' E
6		Bpk.Man	1 GT	Hand Line	1°56'32.14 N - 127°29'719'' E
7		Bpk. Nurdin	3 GT	Hand Line	1°56'32.20'' N - 127°29'900'' E
8	21 - 23 Maret 2024	Bpk. Pole	<5GT	Pancing Ulur	-2°803.384' S - 129°057.563' E
9		Bpk. La Sesa	<5GT	Pancing Ulur	-2°803.384' S - 129°057.563' E
10		Bpk. La Leke	<5GT	Pancing Ulur	-2°803.384' S - 129°057.563' E
11		Bpk. Yohan	<5GT	Pancing Ulur	-2°803.384' S - 129°057.563' E
12		Bpk. Yopi Watloli	<5GT	Pancing Ulur	-2°803.384' S - 129°057.563' E
13		Bpk. Tono	<5GT	Pancing Ulur	-2°803.384' S - 129°057.563' E

14		Bpk. La Arifin	<5GT	Pancing Ulur	-2°76.454' S - 129°024.498' E
15	27 Maret 2024	Ramadan Awal	1 GT	Pancing Tonda	-4.530124° S - 129.906168° E
16		Aliba	1 GT	Pancing Tonda	-4.53043° S - 129.9065° E
17		Suliwa	1 GT	Pancing Tonda	-4.53019° S - 129.906287° E
18	25 - 29 Juli 2024	Saleh	<5GT	Hand Line	-3.552121 LS - 128.343304 BT
19		Marsel	<5GT	Hand Line	-3. 566812 LS - 128. 330006 BT
20		Geral	<5GT	Pancing Ulur	-3. 577515 LS - 128.33078 BT
21		Faldo	<5GT	Hand Line	-3. 566865 LS - 128.330956 BT
22		La Yusril	<5GT	Pancing Ulur	-3. 549104 LS - 128.349015 BT
23		La Teri	<5GT	Pancing Ulur	-3. 549095 LS - 128.349033 BT
24		Hadi	<5GT	Pancing Ulur	-3. 552967 LS - 128. 345565 BT
25	19 - 21 Agustus 2024	Hanan	<5GT	Pancing Ulur	- 04°545444''S - 129°892782''E
26		Taip	<5GT	Pancing Dasar	- 04°546273''S - 129°879286''E
27		Muhammad	<5GT	Pancing Dasar	- 04°54444''S - 129°892782''E
28		Abdula	<5GT	Pancing Ulur	- 04°522606''S - 129°942242''E
29		Eckram	<5GT	Pancing Dasar	0°56.575' S - 128°18.630' E
30	06 September 2024	Riyan Zainori	<5GT	Panah	1°36.081' S - 127°23.879' E
31		Sumiati	<5GT	Panah	- 04°545444''S - 129°892782''E
32	3 - 7 Oktober 2024	Ono Borongusi	<5GT	Pancing Dasar	'- 3.608973°S - 128.389212°E
33		Sarman Bugis	<5GT	Pancing Dasar	'- 3.609074°S - 128.389313°E
34		Junaidi Ohoirella	<5GT	Pancing Dasar	'- 3°35'11.90429''S - 128°20'0.0775''E
35		Alvian Hehanussa	<5GT	Pancing Dasar	'- 3°35'6.57229''S - 128°20'4.50625''E
36		Lanur	<5GT	Pancing Dasar	'- 3°33'17.21207''S - 128°21'2.41733''E
37	28 - 29 November 2024	Jamal	<5GT	Pancing Dasar	'-3. 587110 LS - 128.328658 BT

- **Sasaran Kegiatan 4 "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan"**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 yaitu "*Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan*" diuraikan dalam 1 IKU yaitu (1) "Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha perikanan dan pemanfaatan sumber daya perikanan".

Tabel 3.20 Capaian Sasaran Kegiatan 4 "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja		Target 2024	Target DESEMBER	Capaian DESEMBER	%	Capaian s/d DESEMBER	%
S.04	**Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan**				100		100	
	IKS.04.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100	100	100	100	200	100

6. **IKU 4.1 "Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha perikanan dan pemanfaatan sumber daya perikanan"**

Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha perikanan dan pemanfaatan sumber daya perikanan adalah nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha dengan jumlah pelaku usaha perikanan yang diriksa. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan adalah upaya untuk memastikan tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan melalui tahapan pemeriksaan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Pelaku usaha perikanan adalah unit/proyek usaha orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang perikanan mencakup subsektor penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terdiri atas pengawasan rutin berbasis OSS dan pengawasan lainnya (pengawasan penangkapan ikan terukur, importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya ikan dan/atau tindak lanjut aduan masyarakat) yang dilaksanakan secara rutin maupun insidentil.

Pada Tahun 2024 capaian kinerja IKU "Persentase penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha perikanan" yakni 100 dari yang ditargetkan 100 atau 100%. IKU ini sama pencapaiannya dengan Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023 sehingga

dapat dikatakan bawa semua UPT mampu melaksanakan capaian sesuai dengan target yang ditetapkan (Tabel 3.11).

Tabel 3.21 Capaian kinerja IKU 4.1 "Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.04.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100	100	100	100	100

Berdasarkan data capaian diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja "Persentase penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha perikanan" jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat diketahui bahwa Stasiun PSDKP dapat mempertahankan capaian dan menjadi tolak ukur tercapainya IKU ini dalam target jangka menengah. IKU ini juga merupakan salah satu IKU yang diterapkan pada seluruh UPT lingkup Ditjen PSDKP. Adapun nilai capaian UPT lainnya (Cilacap, Kupang dan Biak) dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan hal ini dapat dilihat pada (Gambar 11).

Gambar 12. Capaian kinerja persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

Seluruh pencapaian kegiatan yang dilakukan terhadap IKU ini tidak terlepas dari peran serta Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon dalam melakukan kegiatan pengawasan dengan tujuan menertibkan peraturan perundang-undangan bagi para pelaku usaha yang bergerak dibidang perikanan dalam hal ini memberikan dampak langsung terhadap sumber daya perikanan.

Untuk meningkatkan keterampilan pengawas perikanan dalam menunjang kegiatan pengawasan pada Tahun 2024, sebanyak 2 orang ASN pengawas perikanan

telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan, 1 orang ASN pengawas perikanan telah mengikuti Pelatihan Dasar Intelijen Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2024 di Pusat Pendidikan (Pusdik) Intelijen, 5 orang ASN Pengawas Perikanan Ujian Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Dasar *Fisheries Inteliigence* Lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2024, 1 orang ASN pengawas perikanan dan 1 orang staf Stasiun PSDKP Ambon telah mengikuti kegiatan Konsolidasi Teknis Calon Operator e-SLO, 3 orang ASN pengawas perikanan telah mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengawas Perikanan serta 2 orang ASN pengawas perikanan telah mengikuti diklat dasar pengawas perikanan.

Keberhasilan IKU ini diperoleh dari pencapaian beberapa kegiatan pengawasan yakni :

1. Pengawasan rutin berbasis OSS;
2. Pengawasan penangkapan ikan terukur;
3. Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional;
4. Pengawasan incidental

. (Gambar 12).

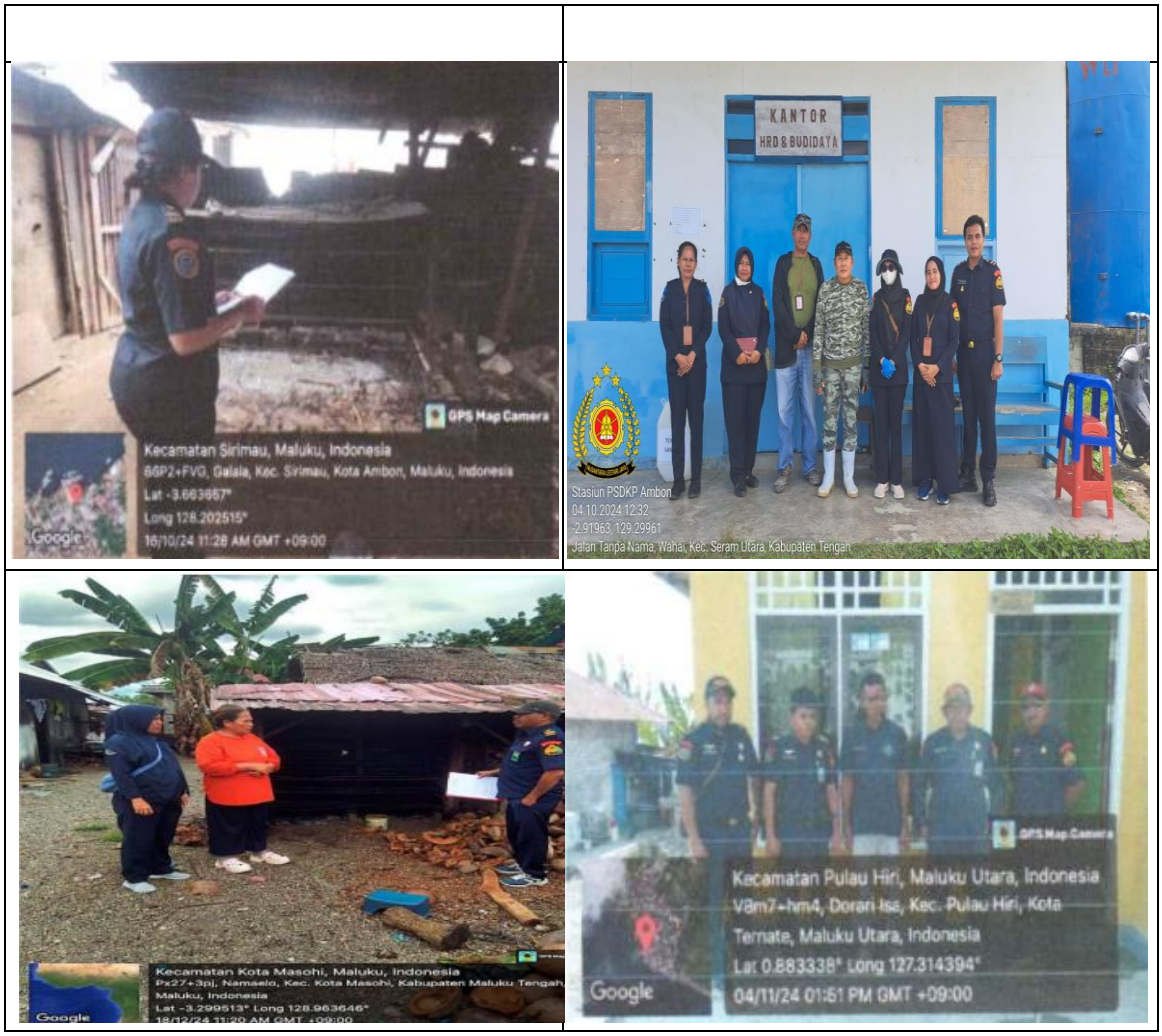

Gambar 13. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tahun 2024

Pada Tahun 2024 telah dilakukan kegiatan pengawasan berbasis resikp berdasarkan PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan. Adapun uraian hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan Stasiun PSDKP Ambon sebagai berikut :

❖ **Pengawasan Budidaya**

Pada Tahun 2024 telah dilakukapn pengawasan budidaya ikan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan terhadap 61 pelaku usaha KBLI bidang Pembesaran Tumbuhan Air Laut, Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam, Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut,

Pembesaran Crustacea Air Payau, Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah, budidaya biota air laut dan pembenihan ikan air payau.

Tabel 3.22 Hasil Pengawasan Budidaya

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Perusahaan /Pelaku USaha	NIB	Nomor Kode Proyek	Titik Koordinat Lokasi Usaha	Status Penanaman Modal	Nama KBLI	Skala Usaha
1	25 - 26 Maret 2024	Pokdakan Sumber Tirta Kencana	-	-	-02°96,2'42,6"LS - 129° 92,3'87;8"BT	PMDN	-	-
2	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
3	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
4	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
5	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
6	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
7	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
8	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
9	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
10	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
11	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
12	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
13	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
14	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
15	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
16	02-03 Mei 2024	-	-	-	2.127053 LU 128.2008 BT	PMDN	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
17	23 Mei 2024	-	-	-	- 20046033477429 300 LS 125.9748176113 9443 BT	PMDN	- Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	-
18	23 Mei 2024	-	-	-	- 2.003579241109 132 LS	PMDN	- Pembesaran Pisces/Ikan	-

					125.9755225206374 BT		Bersirip Laut	
19	23 Mei 2024	-	-	-	- 2.003579241109132 LS 125.9755225206 3734 BT	PMDN	- Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	-
20	23 Mei 2024	-	-	-	- 2.004603347742 9344 LS 125.9748176113 9443 BT	PMDN	- Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	-
21	23 Mei 2024	-	-	-	- 2.005631573630 076 LS 125.9735261180 3285 BT	PMDN	- Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
22	23 Mei 2024	-	-	-	- 2.005631573630 076 LS 125.9735261180 3285 BT	PMDN	- Pembesaran Tumbuhan Air Laut	-
23	28 Mei 2024	-	-	-	-1,05611 LS 128.1331 BT	PMDN	- Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	-
24	28 Mei 2024	-	-	-	-1,065 LS 128.1319 BT	PMDN	- Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	-
25	28 Mei 2024	-	-	-	-1,08333 LS 128.125 BT	PMDN	- Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	-
26	28 Mei 2024	-	-	-	-1,06722 LS 128.1442 BT	PMDN	- Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	-
27	28 Mei 2024	-	-	-	-1,08361 LS 128.1444 BT	PMDN	- Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	-
28	28 Mei 2024	-	-	-	-1,08333LS 128.1444 BT	PMDN	- Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	-
29	28 Mei 2024	-	1805240051339	202405-1823-0139-9912-788	-1,05889LS 128.1461 BT	PMDN	- Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	-
30	28 Mei 2024	-	1805240051339	202405-1823-0139-9912-788	-1,0525LS 128.1461 BT	PMDN	- Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	-
31	28 Mei 2024	-	1805240051339	202405-1823-0139-9912-788	-1,08333LS 128.1506 BT	PMDN	- Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	-
32	15 Juli 2024	-	1307230129672	202307-1319-1704-2284-725	0.699722222222 2222 LS - 127.4569444444 4445 BT	PMDN	-Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	-
33	15 Juli 2024	-	1307230129672	202307-1319-1704-2284-725	0.699722222222 2222 LS - 127.4569444444 4445 BT	PMDN	-Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	-
34	15 Juli 2024	-	1307230129672	202307-1319-1704-2284-725	0.699722222222 2222 LS - 127.4569444444 4445 BT	PMDN	-Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	-

35	15 Juli 2024	-	1307230129672	202307-1319-1704-2284-725	0.6997222222222222 LS - 127.45694444444445 BT	PMDN	-Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	-
36	15 Juli 2024	-	1307230129672	202307-1319-1704-2284-725	0.6997222222222222 LS - 127.45694444444445 BT	PMDN	-Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	-
37	16 Juli 2024	-	1307240019904	202407-1312-4252-3172-385	0.6991666666666667 LS - 127.45638888888889 BT	PMDN	-Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	-
38	16 Juli 2024	-	1307240019904	202407-1312-4252-3172-385	0.6991666666666667 LS - 127.45638888888889 BT	PMDN	-Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	-
39	16 Juli 2024	-	1307240019904	202407-1312-4252-3172-385	0.6991666666666667 LS - 127.45638888888889 BT	PMDN	-Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	-
40	17 Juli 2024	-	1307240019904	202407-1312-4252-3172-385	0.6991666666666667 LS - 127.45638888888889 BT	PMDN	-Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	-
41	17 Juli 2024	-	1307240019904	202407-1312-4252-3172-385	0.6991666666666667 LS - 127.45638888888889 BT	PMDN	-Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	-
42	16 Juli 2024	-	1307230127025	202307-1318-4619-9616-277	0.6997222222222222 LS - 27.45638888888889 BT	PMDN	- Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	-
43	17 Juli 2024	-	1307230127025	202307-1318-4619-9616-277	0.6997222222222222 LS - 127.45638888888889 BT	PMDN	- Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	-
44	17 Juli 2024	-	1307230127025	202307-1318-4619-9616-277	0.6997222222222222 LS - 127.45638888888889 BT	PMDN	- Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	-
45	17 Juli 2024	-	1307230127025	202307-1318-4619-9616-277	0.6997222222222222 LS - 127.45638888888889 BT	PMDN	- Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	-
46	02 Agustus 2024	-	-	-	-2.963381 LS - 129.924174	PMDN	- Pembesaran Crustacea Air Payau	-
47	02 Agustus 2024	-	-	-	-2.963381 LS - 129.924174	PMDN	- Pembesaran Crustacea Air Payau	-
48	02 Agustus 2024	-	-	-	-2.963381 LS - 129.924174	PMDN	- Pembesaran Crustacea Air Payau	-
49	02 Agustus 2024	-	-	-	-2.963381 LS - 129.924174	PMDN	- Pembesaran Crustacea Air Payau	-
50	02 Agustus 2024	-	-	-	-2.963381 LS - 129.924174	PMDN	- Pembesaran Crustacea Air Payau	-
51	02 Agustus 2024	-	-	-	-2.963381°LS – 129.924174°BT	PMDN	- Pembesaran Crustacea Air Payau	-
52	11 September 2024	-	3010230250112	202310-3016-4525-6215-724	0.187777777777777777 N - 127.127.87722222222222 E	PMDN	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	Mikro
53	11 September 2024	-	3010230250112	202310-3016-4525-6215-724	0.187777777777777777 N - 127.127.87722222222222 E	PMDN	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	Mikro

54	11 September 2024	-	3010230250112	202310-3016-4525-6215-724	0.187777777777777777 N - 127.127.87722222222222 E	PMDN	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	Mikro
55	11 September 2024	-	3010230250112	202310-3016-4525-6215-724	0.187777777777777777 N - 127.127.87722222222222 E	PMDN	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	Mikro
56	11 September 2024	-	-	-	0.187777777777777777 N - 127.127.87722222222222 E	PMDN	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	Mikro
57	11 September 2024	-	-	-	0.187777777777777777 N - 127.127.87722222222222 E	PMDN	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	Mikro
58	11 September 2024	-	-	-	0.187777777777777777 N - 127.8772222222222222 E	PMDN	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	Mikro
59	11 September 2024	-	1408240140879	202408-1422-3101-3266-800	0.161111111111111111 N - 127.890555555555557 E	PMDN	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	Mikro
60	04 Oktober 2024	PT Wahana Lestari Investama	'9120203590631	'201912-2917-2506-2314-032	'-2.91455, 129.30154 dan -2.30588, 129.6496977	PMA	'Budidaya Biota Air Laut Lainnya	Usaha Besar
61	04 Oktober 2024	PT Hisenor Technology Indonesia	'9120006152183	-	'-2.799256º, 129.369337º	PMA	'Pembenihan Ikan Air Payau	Usaha Besar

❖ Pengawasan Unit Pengolahan Ikan

Pada Tahun 2024 telah dilakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko pada subsektor pengolahan dan pemasaran ikan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan pada 20 pelaku usaha perikanan yang dilaksanakan pada 2 Perusahaan dengan KBLI Industri Pendinginan, Industri Pembekuan Ikan dan Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan, Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, yaitu PT. Sanana Pelangi Indonesia yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara dan PT. Wahana Lestari Investama yang berlokasi di Desa Oping, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dan 15 pelaku usaha perorangan dengan KBLI 10212.

Tabel 3.23 Hasil Pengawasan Unit Pengolahan Ikan

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Perusahaan	NIB	Nomor Kode Proyek	Titik Koordinat Lokasi Usaha	Status Penanaman Modal	Kode KBLI	Skala Usaha
1	22 Mei 2024	PT. Sanana Pelangi Indonesia	8120003732835	202101-2620-2253-7331-954	2.015361111111111 LS, 125.97827777777778 BT	PMA	KBLI 10217 - Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	Usaha Besar
2	22 Mei 2024	PT. Sanana Pelangi Indonesia	8120003732835	202201-2415-5355-8585-560	2.015361111111111 LS, 125.97827777777778 BT	PMA	KBLI 10213 — Industri Pembekuan Ikan	Usaha Besar

3	22 Mei 2024	PT. Sanana Pelangi Indonesia	8120003732835	201912-2322-0617-8977-365	2.015361111111111 LS, 125.978277777777778 BT	PMA	KBLI 10219 — Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	Usaha Besar
4	27 September 2024	Erni Hasan	-	201912-2322-0617-8977-365	2.015361111111111 LS, 125.978277777777778 BT	PMA	KBLI 10219 — Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	Usaha Besar
5	27 September 2024	Nebgsi Ode	-	-	'-3.589560, 128.332645	PMDN	Berdasarkan Pengawasan termasuk dalam KBLI 10212	-
6	27 September 2024	Mansur Kota	-	-	'- 3.5952, 128.331	PMDN	Berdasarkan Pengawasan termasuk dalam KBLI 10212	-
7	27 September 2024	Masita Wala	-	-	'- 3.589631, 128.332885	PMDN	Berdasarkan Pengawasan termasuk dalam KBLI 10212	-
8	03/Oktober/2024	'PT. Wahana Lestari Investama	'9120203590631	'202303-2009-5756-2217-751	'-3.589436, 128.332501	PMA	'10293 - Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	'Usaha Besar
9	03/Oktober/2024	'PT. Wahana Lestari Investama	'9120203590631	'202303-2009-5756-2217-751	'201912-2917-2506-2458-906	PMA	'10293 - Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	'Usaha Besar
10	16/Oktober/2024	Sani Taudo	-	-	-3.663684, 128.202532	-	Berdasarkan Pengawasan termasuk dalam KBLI 10212	-
11	16/Oktober/2024	Stella Sopacua	-	-	-3.663597, 128.20307	-	Berdasarkan Pengawasan termasuk dalam KBLI 10212	-
12	16/Oktober/2024	Cornelia Bonara	-	-	-3.663629, 128.203082	-	Berdasarkan Pengawasan termasuk dalam KBLI 10212	-
13	16/Oktober/2024	Popy Tamaela	-	-	-3.663934, 128.202125	-	Berdasarkan Pengawasan termasuk dalam KBLI 10212	-
14	13 Desember 2024	Hasrida	-	-	0.659622°S 127.480491°E	-	Berdasarkan Pengawasan termasuk dalam KBLI 10212	-
15	13 Desember 2024	Rahman Ode	-	-	0.659633°S 127.480476°E	-	Berdasarkan Pengawasan termasuk dalam KBLI 10212	-
16	13 Desember 2024	Wa Ode Maiana	-	-	0.659347°S 127.480494°E	-	Berdasarkan Pengawasan termasuk dalam KBLI 10212	-
17	18 Desember 2024	Rahmatia Sangadji	-	-	-3.299513°, 128.963646°	-	Berdasarkan Pengawasan termasuk dalam KBLI 10212	-
18	18 Desember 2024	Nurhayati Simal	-	-	-3.353479°, 129.020576°	-	Berdasarkan Pengawasan termasuk dalam KBLI 10212	-
19	18 Desember 2024	Muhammat Camang	-	-	-3.301968°, 128.951935°	-	Berdasarkan Pengawasan termasuk dalam KBLI 10212	-
20	18 Desember 2024	Jahara	-	-	-3.298419°, 128.953939°	-	Berdasarkan Pengawasan termasuk dalam KBLI 10212	-

❖ Pengawasan Pemasaran

Pada Tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan unit pengolahan ikan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan terhadap 6 pelaku usaha dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

Tabel 3.24 Hasil Pengawasan Unit Pemasaran Ikan

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Perusahaan	NIB	Nomor Kode Proyek	Titik Koordinat Lokasi Usaha	Status Penanaman Modal	Kode KBLI	Skala Usaha
1	21 Mei 2024	Abdul Muhatir Fataruba	-	-	-2.003247 LS, 125.975636 BT	PMDN	Berdasarkan Pengawasan termasuk dalam KBLI 47215 - Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	-
2	21 Mei 2024	La Oki	-	-	-2.003812 LS, 125.9755 BT	PMDN	Berdasarkan Pengawasan termasuk dalam KBLI 47215 - Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	-
3	29 Juli 2024	Veridiana Maria	9120200161673	202401-0909-0639-0165-104	3.634500216666 6665, 128.2400197388 889	PMDN	Berdasarkan Pengawasan termasuk dalam KBLI 50133	Usaha Besar
4	29 Juli 2024	Veridiana Maria	9120200161673	202401-0510-3024-1056-001	3.642833549999 9998, 128.2400197388 889	PMDN	Berdasarkan Pengawasan termasuk dalam KBLI 50133	Usaha Besar
5	29 Juli 2024	Veridiana Maria	9120200161673	202312-2207-5857-7289-486	-3.878818, 130.903083	PMDN	Berdasarkan Pengawasan termasuk dalam KBLI 50133	Usaha Besar
6	3/Oktober/2024	'PT. Wahana Lestari Investama	'9120203590631	'201912-2917-2506-2606-545	'-3.589436, 128.332501	PMA	'KBLI 46324— Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	

❖ Pengawasan Kapal Perikanan

Pada Tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan

usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan terhadap 18 pelaku usaha (Kapal Penangkap). Adapun hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.25 Hasil Pengawasan Kapal Perikanan

NO	Tanggal Pemeriksaan	Nama Pelaku Usaha	Nama Kapal	Nama Perusahaan	Nomor Induk Berusaha	Titik Koordinat	KBLI	Skala Usaha
KAPAL PENANGKAP								
1	26 Maret 2024	Hermanto	KM. Inka Mina - 286	Koperasi Perikanan Santo Alvin Pratama	8120008931009	00°46'5,856"LU - 127°22'38,85"BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan bersirip di Laut	Besar
2	26 Maret 2024	Hermanto	KM. Nelayan 2017 986	Koperasi Perikanan Santo Alvin Pratama	8120008931009	00°46'5,856"LU - 127°22'38,85"BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan bersirip di Laut	Besar
3	28 Maret 2024	Irfan Abd. Rahman	KM. Inka Mina - 988	Koperasi Jasa Perikanan Setia Satu Hati	1409210069812	00°48'51,28"LU - 127°23'20,031"BT	03111 - Penagkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Besar
4	28 Maret 2024	Zubair M. Said	KM. Putra Putri 02	Zubair M. Said	1259000131739	00°48'12,610"LU - 127°23'13,427"BT	03111 - Penagkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Besar
5	28 Maret 2024	Zubair M. Said	KM. Putra Putri Prataya	Zubair M. Said	1259000131739	00°48'12,610"LU - 127°23'13,427"BT	03111 - Penagkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Besar
6	28 Maret 2024	Zubair M. Said	KM. Putra Putri 01	Zubair M. Said	1259000131739	00°48'12,610"LU - 127°23'13,427"BT	03111 - Penagkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Besar
7	28 Maret 2024	Zubair M. Said	KM. Putra Putri III	Zubair M. Said	1259000131739	00°48'12,610"LU - 127°23'13,427"BT	03111 - Penagkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Besar
8	27 Maret 2024	Siswanto	-	PT. Bahana Maluku	1279000231193	-3°38'31,956''LS - 128°16'1,920''BT	03122 - Penangkapan Crustacea Di Perairan Darat	Usaha Besar
9	27 Maret 2024	Ahmad Bahtiar	KM. Inka Mina - 984	KUB. Putra Sibela	1312210028287	-0°37′31,674"S - 127°28′30,058"E	03111 - Penagkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Kecil
10	27 Maret 2024	Rusdi M. Akil	KM. Inka Mina - 281	KUB. Tri Asturi	301220021173	-0°39'4,199''S - 127°28'46,982''E	03111 - Penagkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Kecil

11	02 Mei 2024	KUB. Saputri (Muhammad Konoras)	KM. Inka Mina - 986	KUB. Saputri	0701220019774	0°37'25" LS - 127°23'49"BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Menengah
12	02 Mei 2024	KUB. Anugrah Guraping (Firdaus Hamzah)	KM. Mina Maritim - 144	KUB. Anugrah Guraping	1008210012978	0.735 LS - 127.385 BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Besar
13	02 Mei 2024	KUB. Kie Matubu (Abubakar Fara)	KM. Inka Mina - 989	KUB. Kie Matubu	1211000501274	0.6227777777777778 LS - 127.40555555555557 BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Menengah
14	03 Mei 2024	KUB. Sinar Tomalou (Irwan Suleman)	KM. Inka Mina - 993	KUB. Sinar Tomalou	1226000612783	0.685 LS - 127.45555555555556 BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Menengah
15	03 Mei 2024	KUB. Sonyinga (Musa Amir)	KM. Inka Mina - 275	KUB. Sonyinga	1259000322023	0.6227777777777778 LS - 127.40555555555557 BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Kecil
16	02 Mei 2024	Junaidi Lestaluhu	KM. Lai - Lai 02	Junaidi Lestaluhu	1101220046396	2.970478° LS - 128,115497°BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Kecil
17	02 Mei 2024	Koperasi Kemaritiman Taman Siswa (M.Fauzi Muslim)	KM. Tuna Morotai	Koperasi Kemaritiman Taman Siswa	1298000322454	2°22'54.1" N - 128°39'50.3"E	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Kecil
18	04 November 2024	KUB. Sigaro Malaha Bahari (Abdullatif Ade)	KM. Inka Mina - 520	KUB. Sigaro Malaha Bahari	'0309210028608	'00°52'60"LU - 127°18'52"BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Kecil

- **Sasaran Kegiatan 5 "Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan"**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 yaitu *"Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%) dan Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)*. Adapun capaian Indikator Kinerja pada Sasaran kegiatan 5 sebagai berikut :

Tabel 3.26 Capaian Sasaran Kegiatan 4 "Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan"

NO		Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2024	Target DESEMBER	Capaian DESEMBER	%	Capaian s/d DESEMBER	%
S.05		**Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan**			**100**		**100**	
	IKS.05.1	Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100	100	100	100	100	100

	IKS.05.2	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100	100	100	100

7. IKU 5.1 "Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)"

Persentase prasarana pendukung pengawasan SDKP yang diselesaikan adalah penilaian kemajuan fisik/konstruksi pengadaan pembangunan gudang logistik paving blok Stasiun PSDKP Ambon; Pengadaan prasarana pendukung pengawasan SDKP dilaksanakan di Stasiun PSDKP Ambon; Pembangunan prasarana pengawasan SDKP dilaksanakan di UPT Ditjen PSDKP. Penyelesaian pengadaan prasarana pendukung pengawasan SDKP ditargetkan selesai dalam satu tahun anggaran 2024. Target indikator persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan sebesar 100%.

Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan : 100%

Sarana Prasarana : Paving Blok dan Gudang Logistik

$$Psp = \frac{\sum a1 + a2}{b}$$

$$Psp = \frac{\sum 100 + 100}{2}$$

$$Psp = 100\%$$

Keterangan:
Psp = Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)
$\Sigma a1+a2$ = Jumlah persentase penyelesaian sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)
b = Jumlah sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (Unit)

Tabel 3.27. Capaian IKU 5.1"Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.05.1	Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	-	100	-	-	100

Indikator kinerja ini di Tahun 2024 ditargetkan pencapaiannya sebesar 100% dan telah terealisasi 100%. Sama halnya dengan hasil capaian Indeks pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP pada Tahun 2021 yaitu sebesar 100% (Tabel 3.23)

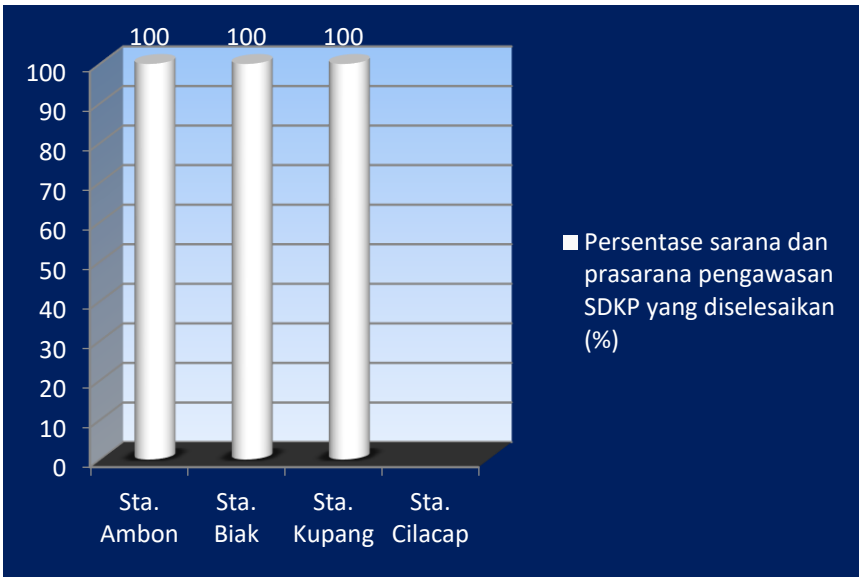

Gambar 14. Capaian kinerja Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%) lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

IKU ini juga merupakan salah satu IKU yang diterapkan pada UPT lingkup Ditjen PSDKP. Adapun nilai capaian UPT lainnya (Kupang dan Biak) dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.11 sedangkan UPT Stasiun PSDKP Cilacap tidak melakukan perhitungan terhadap Indeks Kinerja ini.

8. IKU 5.2 "Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)"

Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah Jumlah persentase kegiatan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 4 (empat) unit *Speedboat*. Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari:

1. Perawatan pencegahan (*preventive maintenance)* 50% dengan nilai 50;
2. Perawatan prediktif *(predictive maintenance)* 40% dengan nilai 40, dan
3. Perawatan darurat (*breakdown maintenance)* 10% dengan nilai 10.

Tabel 3.28. Capaian IKU 5.2 "pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.05.2	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100	100	100

Indikator kinerja ini di Tahun 2020,2021,2022 dan 2023 ditargetkan pencapaiannya sebesar 100% dan telah terealisasi 100%. Sama halnya dengan hasil capaian Indeks pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP pada Tahun 2024 yaitu sebesar 100%.

Tabel 3.29. Perhitungan Indeks Kinerja Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIN	NILAI	KET
1	**PERAWATAN PREVENTIF (50)**				**50**	
1	Pemeliharaan dan perawatan rutin	1	1	100		Laporan harwat rutin
2	Pengedokan atau pelimbungan	1	1	100		Tidak ada Pengedokan atau pelimbungan
3	Servis/perbaikan	1	1	100		Laporan perbaikan
4	Analisis Teknis	1	1	100		Laporan Hasil Analisis
5	Pengecekan	9	9	100		Tidak ada pekerjaan Pengecekan
II	PERAWATAN PREDIKTIF (40)			100	**40**	
1	Overhaul	1	1	100		Tidak ada kegiatan overhaul
2	Kalibrasi	1	1	100		Tidak di lakukan Kalibrasi
3	Suku Cadang	1	1	100		Dokumen Pendukung: Stock Opname Suku Cadang
4	Perlengkapan Kapal	1	1	100		Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST - Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%)
5	Repowering	1	1	100		Tidak ada Pelaksanaan Repowering
III	PERAWATAN DARURAT (10)			100	**10**	

1	Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan tanpa ada perencanaan atau pada saat kondisi tidak normal atau tidak terduga yang berpotensi menimbulkan dampa kerusakan yang lebih besar dan memerlukan tindakan yang cepat	1	1	100		Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST - Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%)
	TOTAL CAPAIAN (%)			100	100	

IKU ini juga merupakan salah satu IKU yang diterapkan pada seluruh UPT lingkup Ditjen PSDKP. Adapun nilai capaian UPT lainnya (Cilacap, Kupang dan Biak) dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100% hal ini dapat dilihat pada (Gambar 14).

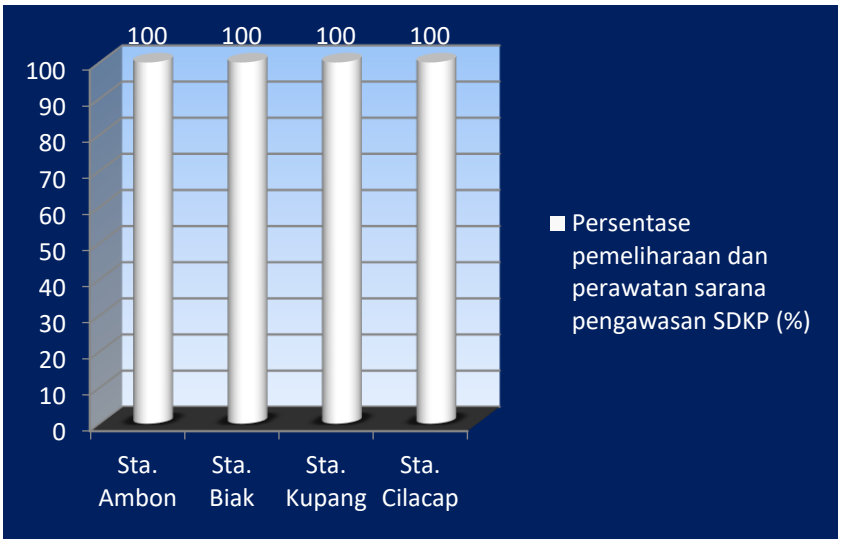

Gambar 15. Capaian kinerja persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

- **Sasaran Kegiatan 6 "Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas"**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 yaitu "*Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas*" diuraikan dalam 2 IKU yaitu (1) "Indeks Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan"

dan (2) Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

Tabel 3.30. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan 6 "Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas"

NO		Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2024	Target DESEMBER	Capaian DESEMBER	%	Capaian s/d DESEMBER	%
S.06		Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas			100		100	
	IKS.06.1	Indeks Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80	80	80	100	80	100
	IKS.06.2	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80	80	80	100	80	100

9. IKU 6.1 "Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan"

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:

a) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;

b) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Tabel 3.31. Capaian kinerja IKU 6.1 "Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.06.1	Indeks Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	100	100	100	100	80

Pada Tahun 2024 capaian IKU 6.1 "Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan" tercapai dengan nilai sebesar 80. Pada Tahun 2020, 2022 dan

2023 nilai capaian sebesar 100, sedangkan pada Tahun 2024 nilai capaian sebesar 80 dengan upaya pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan terhadap 16 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Tabel 3.32. Perhitungan Indeks kinerja pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan"

No.	Pelaku Usaha	Pelanggaran	Proses Penanganan			
		Rincian Pelanggaran	Jenis Sanksi Administratif	Jumlah Denda Administratif (Rp)	Kode Billing	Tanggal Penyetoran
1	KM. INKA MINA 23	Pelanggaran Terhadap Tidak Memiliki Perizinan Berusaha	SP-1	-	-	-
2	KM. INKA MINA 540	Pelanggaran Terhadap Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha	SP-1	-	-	-
3	Rahmad Hidayat	tidak memenuhi Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh saudara yaitu melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan mengenai jenis ikan dan genetik yang dilindungi	SP-1	-	-	-
4	Dirga	tidak memenuhi Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh saudara yaitu melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan mengenai jenis ikan dan genetik yang dilindungi,	SP-1	-	-	-
5	PT BARTRA PUTRA MULIA	Pelanggaran Tidak Memiliki Dokumen PKKPRL dan Ijin Reklamasi	1. Paksaan Pemerintah 2. Denda Administratif	13.766.400	82024 10000 00000	3 Mei 2024
6	KM. PUTRY VITA	tidak memenuhi Perizinan Berusaha berupa Pelanggaran Jalur Penangkapan Ikan dan menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai	sanksi administratif berupa Peringatan/Teguran Tertulis I	-	-	-
7	KM. LA GRACIA 9	tidak memenuhi Perizinan Berusaha berupa Pelanggaran Jalur Penangkapan Ikan dan menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai	sanksi administratif berupa Peringatan/Teguran Tertulis I	-	-	-
8	KM. LA GRACIA 8	tidak memenuhi Perizinan Berusaha berupa tidak memenuhi Perizinan Berusaha berupa Pelanggaran Jalur Penangkapan Ikan dan menggunakan alat penangkapan	sanksi administratif berupa Peringatan/Teguran Tertulis I	-	-	-
9	KM. MANDIRI JAYA AGUNG	Pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan	Sanksi administratif berupa Denda Administratif	122.496.000	82024 09186 06562	18 Sep 2024
10	PT. SMART MARSINDO	Pelanggaran Tidak Memiliki Dokumen PKKPRL dan Ijin Reklamasi	Sanksi administratif berupa Denda Administratif	24.815.632	82024 09094 36622	10 Sep 2034
11	PT Rimba Kurnia Alam	Pelanggaran Pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki dokumen PKKPRL	Sanksi administratif berupa Denda Administratif	62,933,480	82024 10246 708 23	30 Oct 2024

12	PT.SAMBAKI TAMBANG SENTOSA	Pelanggaran Pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki dokumen PKKPRL	Sanksi administratif berupa Denda Administratif	17,486,348	82024 10246 74986	31 Oct 2024
13	KM. AMAZIA 04	tidak memenuhi Perizinan Berusaha berupa tidak memenuhi Perizinan Berusaha berupa Pelanggaran Jalur Penangkapan Ikan dan menggunakan alat penangkapan	Sanksi administratif berupa Denda Administratif	33,264,000	82024 10140 0838	15 Oct 2024
14	PT. WANATIARA PERSADA	Pelanggaran Pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki dokumen PKKPRL	Sanksi administratif berupa Denda Administratif	268,830,044	82024 11222 08219	26 Nov 2024
15	PT. IWIP	Pelanggaran pemanfaatan ruang berupa tidak memiliki dokumen PKKPRL. Melanggar Pasal 18 angka 12 UU 6 Tahun 2023 jo. Pasal 191 huruf a PP 21 Tahun 2021.	Sanksi administratif berupa Denda Administratif	494,300,283	82024 12162 14683	20 Dec 2024
16	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sofifi	pelanggaran berupa pembangunan Dermaga tanpa memiliki dokumen perizinan dasar berupa Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKKPRL)	SP-1	-	-	-

Komponen ini bersifat situasional, jika nilai capaian 100% maka masuk dalam kriteria nilai indeks 80. IKU “Persentase Pengenaan Sanksi Administratif bidang kelautan dan perikanan” juga merupakan IKU yang ditargetkan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Seluruh pencapaian kegiatan yang dilakukan terhadap IKU ini tidak terlepas dari peran serta Pengawas Kelautan, dan Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon dalam melakukan kegiatan pengawasan dengan tujuan menertibkan peraturan perundang-undangan bagi para pelaku usaha yang bergerak dibidang kelautan dan perikanan dalam hal ini memberikan dampak langsung terhadap sumber daya perikanan.

Untuk meningkatkan keterampilan tim kerja Penanganan Pelanggaran dalam menunjang kegiatan pengawasan penanganan pelanggaran pada Tahun 2024, sebanyak 1 orang ASN telah mengikuti kegiatan Pelatihan Penyidikan TPPU dari Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan, 2 orang ASN telah mengikuti Temu Teknis Operasional Aplikasi Data Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Berdasarkan hasil capaian dapat dilihat bahwa nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon sama dengan capaian UPT PSDKP Stasiun PSDKP Cilacap, Kupang dan Biak atau sebesar 80% (Gambar 15).

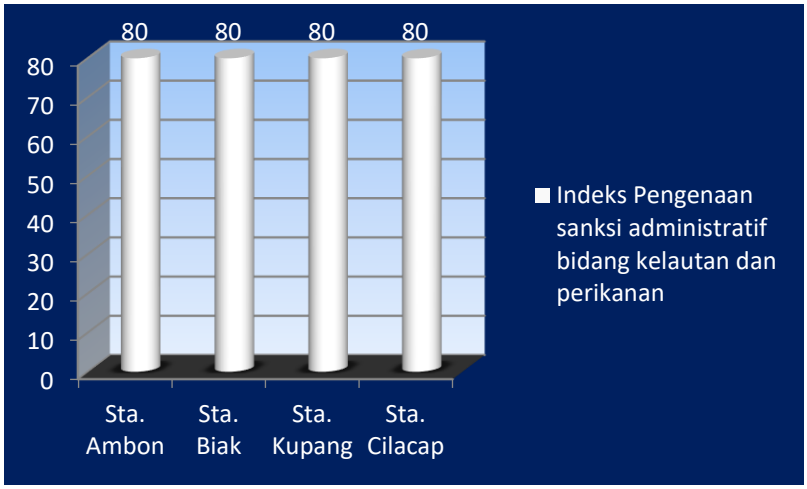

Gambar 16. Capaian kinerja "kinerja pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan" lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

10. IKU 6.2 "Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan"

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b). Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Tabel 3.33. Capaian kinerja IKU 6.2 "Persentase pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.06.2	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	-	-	-	100	80

Pada Tahun 2024 capaian IKU "presentase pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan" tercapai 80 atau sebesar 100%. Komponen ini bersifat situasional, jika nilai capaian 100% maka masuk dalam

kriteria nilai indeks 80, sehingga dapat dikatakan bahwa Stasiun PSDKP Ambon dapat mempertahankan kinerja capaian sebesar 100%. Tahun 2024 jumlah pelanggaran pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan adalah sebanyak 17 Kapal yang terpantau pada Sistem Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Tabel 3.34. Perhitungan Indeks kinerja pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan"

IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Tahun 2024

NO	UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)								ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT						CAPAIAN IKU	
		TRANSSHIPMENT	PELABUHAN PANGKALAN	DPI	JALUR (<12 NM)	IZIN HABIS			JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	PROSES BAP / SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	SP1	SP2	DENDA	PIDANA	%	Kriteria indeks
						<30 hari	>30 hari	Total											
1	AMBON	-		2	15	-	-	-	17		17	17	17	-	-	-	-		
	TOTAL	-	-	2	15	-	-	-	17	-	17	17	17	-	-	-	-		

$$X = \frac{A}{B} \times 100\ \%$$

X : IKU UPT
A : Jumlah orang/pelaku usaha yang sudah selesai diperiksa
B : Jumlah laporan hasil analisis pemantauan kapal pelaku usaha KP yang dilaporkan oleh pusdal (indikasi pelanggaran)

$$X = \frac{17}{17} = 100\%$$

Nilai capaian 100% masuk dalam kriteria nilai indeks 80

KRITERIA INDEKS

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERI
>50%	40	Kurang
50% - 75%	70	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat

Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai

IKU "pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan" ini juga merupakan IKU yang ditargetkan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Berdasarkan hasil capaian dapat dilihat bahwa nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon sebesar 80 sama dengan capaian UPT PSDKP Biak, Kupang dan Cilacap dengan nilai capaian sebesar 80 (Gambar 16.).

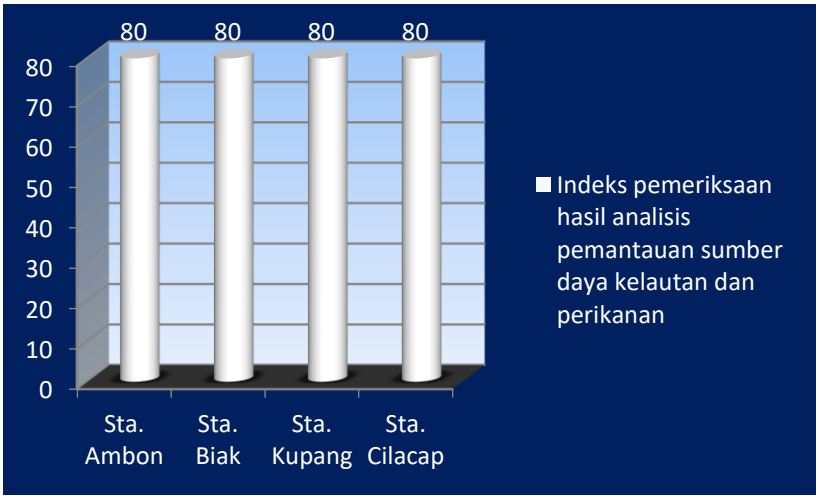

Gambar 17. Capaian kinerja "Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan"

- **Sasaran Kegiatan 7 "Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP"**

Pencapaian sasaran kegiatan 7 yaitu "Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP" pada Tahun 2024 diuraikan dalam 14 Indikator Kinerja (IK). Adapun penjabaran IK sebagai berikut :

Tabel 3.35 Capaian Sasaran Kegiatan 7 "Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP"

NO		Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2024	Target DESEMBER	Capaian DESEMBER	%	Capaian s/d DESEMBER	%
S.07		**Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP**			**111,75**		**111,75**	
	IKS.07.1	Nilai minimal yang Dipersyaratkan untuk membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	75	75	82,47	110	82,47	110
	IKS.07.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	94	94	122,5	120	122,5	120
	IKS.07.11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80	80	95	118,8	95	118,8
	IKS.07.12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80	80	100	120	100	120
	IKS.07.13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	93,76	93,76	88,4	94,28	88,4	94,28
	IKS.07.14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	71	71	93,99	120	93,99	120
	IKS.07.2	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	100	100	100	100	100	100
	IKS.07.3	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	70	70	84,8	120	84,8	120
	IKS.07.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	82	82	86,08	105	86,08	105
	IKS.07.5	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	84	84	86,4	102,9	86,4	102,9
	IKS.07.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80	80	100	120	100	120
	IKS.07.7	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	70	73,58	105,1	73,58	105,1
	IKS.07.8	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup Stasiun PSDKP Ambon	1	1	1	100	1	100
	IKS.07.9	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80	80	96,3	120	96,3	120

11. IKU 7.1"Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Ambon"

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan instansi Stasiun PSDKP Ambon yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju ASN Stasiun PSDKP Ambon yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Tabel 3.36 Capaian IKU 7.1 "Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Ambon"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.07.1	Nilai minimal yang Dipersyaratkan untuk membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	-	-	-	-	82,47

Dapat dilihat bahwa Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Ambon pada Tahun 2024 adalah sebesar 82,47 dari target 75**.** Capaian IK ini diperoleh dari penilaian Mandiri ZI meliputi 6 area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Keberhasilan tercapainya Nilai ini berkat kerjasama seluruh Tim Kerja dalam penilaian Zona Integritas Tahun 2024.

IK ini merupakan indikator kinerja yang dilakukan perhitungan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai melebihi dari target yang ditetapkan atau lebih dari 75 (Gambar 17.)

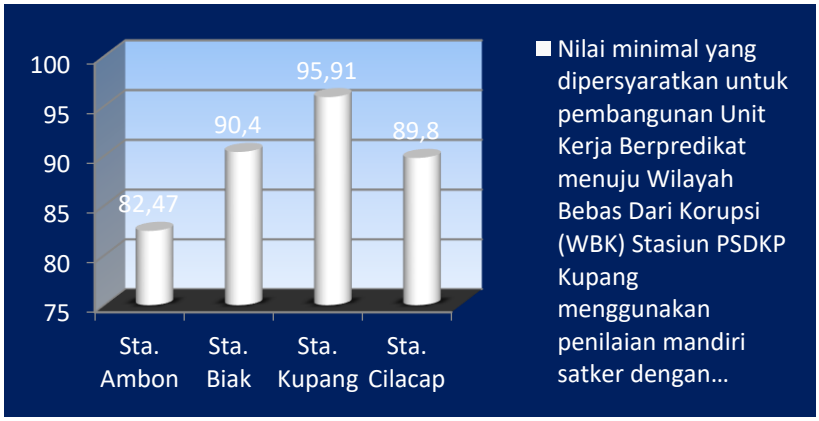

Gambar 18. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP"

12. IKU 7.2"Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)"

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Capaian IK "Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)" pada Tahun 2024 yakni 100 atau 100% dari target yang ditetapkan yakni 100.

Tabel 3.37 Capaian IKU 7.2"Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.07.2	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	-	-	-	100	100

Dapat dilihat bahwa nilai capaian Tahun 2024 ini dapat dipertahankan dengan nilai capaian pada Tahun 2023 (Tabel 3.29). Capaian IK ini dilakukan dalam bentuk pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

IK ini merupakan indikator kinerja yang dilakukan perhitungan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan (Gambar 18)

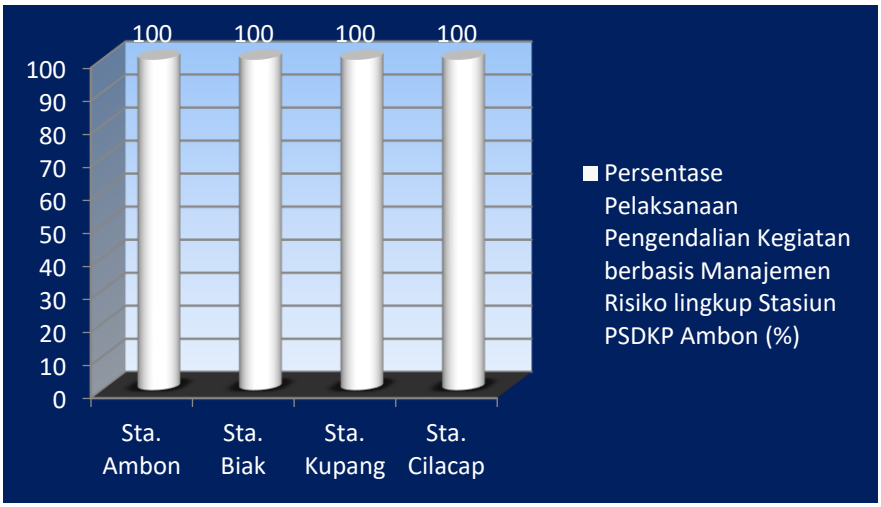

Gambar 19. Capaian Kinerja "Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%) Eselon IV Ditjen PSDKP"

13. IKU 7.3 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP"

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Ditjen PSDKP dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang menyelenggarakan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan,

Tabel 3.38. Capaian IK. 7.3 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.07.3	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	-	-	-	-	84,8

Nilai hasil pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip elektronik Tahun 2024 pada Stasiun PSDKP Ambon adalah 84,80 dengan kategori memuaskan dari target 70 yang ditetapkan dalam Nota Dinas Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 2290/SJ/TU.220/IX/2024. Capaian Kinerja pada IKU ini merupakan hal yang baru dalam perhitungan capaian kinerja pada Tahun 2024.

IK ini merupakan indikator kinerja yang dilakukan perhitungan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai melebihi dengan target yang ditetapkan (Gambar 19)

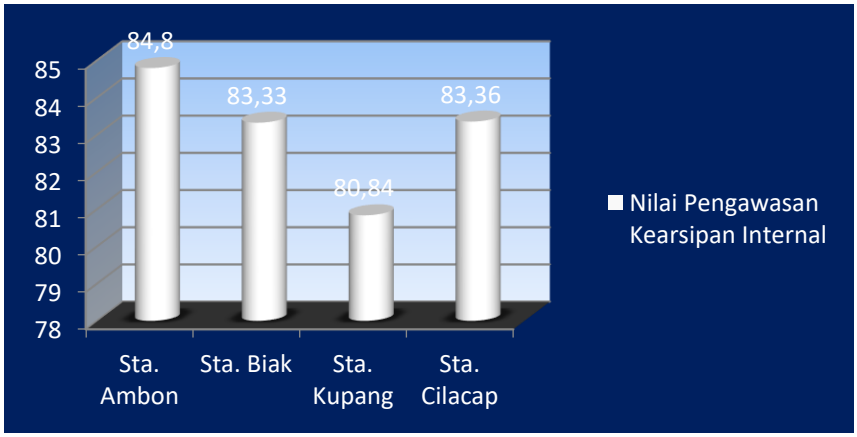

Gambar 20. Capaian Kinerja "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP" Eselon IV Ditjen PSDKP"

14. IKU 7.4 “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:

1. Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)
2. Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:
3. Pejabat Struktural dihitung dgn komponen: DIKLATPIM Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) ; DIKLAT 20JP Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
4. Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dengan komponen: DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) ; DIKLAT 20JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) ; SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
5. Pejabat Fungsional Umum/Staf dihitung dgn komponen: DIKLAT 20 JP; Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0) SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 17,5), tidak pernah (nilai 0)
6. Kinerja (Bobot 30%) yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP), dengan penilaian sebagai berikut: a. Nilai SKP 91 – Ke atas Nilai : 30 (Sangat Baik) b. Nilai SKP 76 – 90 Nilai : 25 (Baik) c. Nilai SKP 61 – 75 Nilai : 15 (Cukup) d. Nilai SKP 51 – 60 Nilai : 5 (Kurang) e. Nilai SKP 50 ke bawah Nilai : 1 *Buruk)
7. Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:
    a. Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Nilai 5;
    b. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan Nilai 3;
    c. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang Nilai 2;

d. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat Nilai 1.

Tabel 3.39 Capaian IK 7.4. "Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.07.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	73,55	72,33	80	91,07	86,08

Pada Tahun 2024 capain IK Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon sebesar 86,08 atau 104,98 dari target yang ditetapkan yakni 83. berdasarkan nilai capaian tersebut jika disandingkan dengan capaian tahun 2020-2022 Indeks ini mengalami kenaikan namun lebih rendah jika dibandingkan dengan Tahun 2023, hal ini juga menjadi tolak ukur perbaikan agar di Tahun depan Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Ambon dapat ditingkatkan. (Gambar 20).

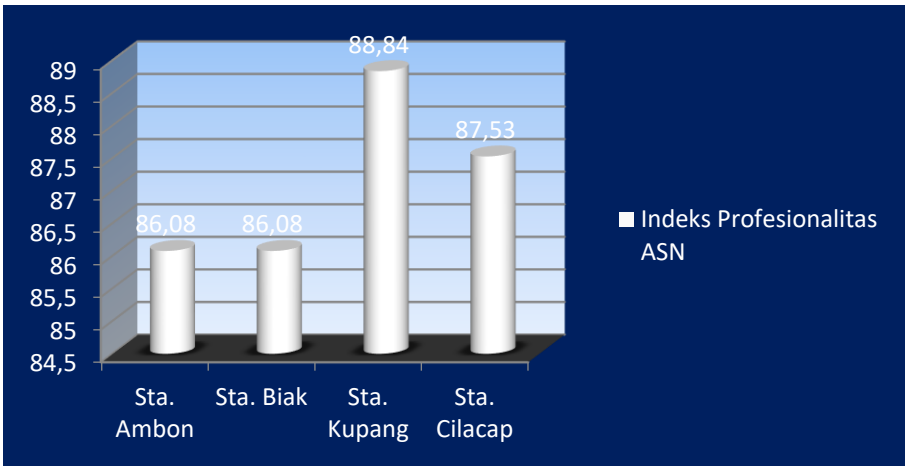

Gambar 21. Capaian "Indeks Profesionalitas ASN lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP"

Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu berkisar 86 – 88% melebihi target yang ditetapkan (Gambar 3.17).

15. IKU 7.5 "Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Ambon"

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang

merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Tabel 3.40 "Capaian IK 7.5. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Ambon"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.07.5	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	-	-	-	83,3	86,4

Pada Tahun 2024 capaian IK 7.5 "Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon" sebesar 86.40 atau 102.86 atau lebih dari target yang ditetapkan yakni 84 (Tabel 3.38). Pencapaian IKM ini berdasarkan formula perhitungan 4 variabel dengan hasil penilaian yakni sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja (25,80%) ;
2. Pengukuran kinerja (24,60%);
3. Pelaporan kinerja (13,50);
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (22,50).

Berdasarkan nilai capaian tersebut jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya maka nilai ini lebih besar dari Tahun 2023. Pencapaian ini tidak terlepas dari kerja keras Seluruh Tim Kerja, Tim Monev Kinerja beserta penanggung jawab pengolah data kinerja dari tiap-tiap tim kerja Stasiun PSDKP Ambon dalam membantu melengkapi semua data dukung dalam penilaian mandiri SAKIP 2024. (Gambar 22).

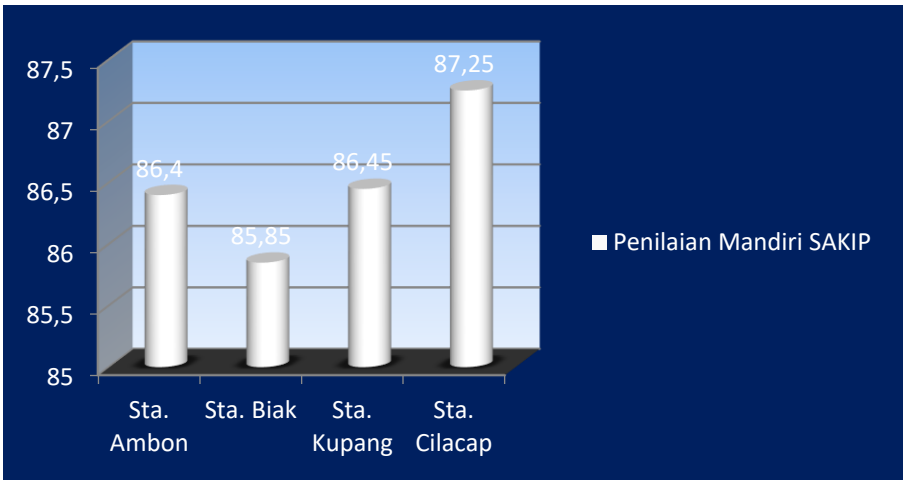

Gambar 22. "Capaian IK 7.5. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP"

Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa UPT PSDKP lainnya (Cilacap, Kupang dan Biak) dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu lebih dari nilai 84 (Gambar 3.18).

16. Capaian IKU. 7.6 "Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan"

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan merupakan Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP, tidak ada sisa rekomendasi temuan Stasiun PSDKP Ambon, sehingga berdasarkan dokumen informasi indikator kinerja, capaian yang didapat setara dengan target yanga telah ditetapkan.

Tabel. 3.41 Capaian IK 7.6" Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.07.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	-	-	100	100	100

Pada Tahun 2024 capaian IK 7.6 "Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan" sebesar 100 atau 120% dari target yang ditetapkan yakni 80. Hasil pencapaian kinerja ini sama dengan Tahun 2022, dan 2023. (Gambar 22).

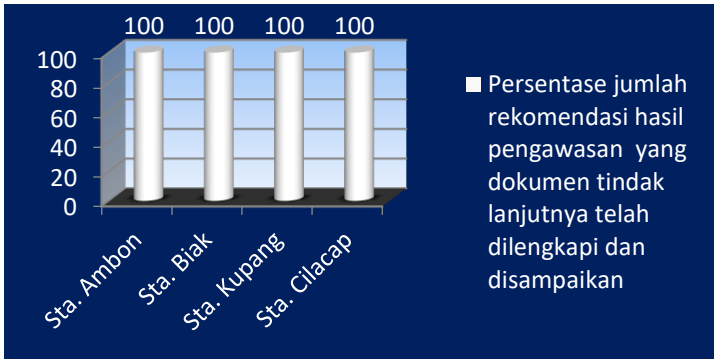

Gambar 23. Capaian Kinerja "Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan" lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

IK ini merupakan indikator kinerja yang tetapkan terhadap seluruh UPT Direktorat Jenderal PSDKP, berdasarkan perbandingan dengan beberapa UPT lainnya, dapat dilihat bahwa, capaian IKM Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan memiliki nilai yang setara dengan UPT Lainnya lingkup DITJEN PSDKP (Gambar 3.19).

17. Capaian IK. 7.7 "Nilai Implementasi Program Budaya Kerja"

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Unsur Budaya Kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari:

1. Tim Satker (6)
2. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (12)
3. Lima Menit Sebelum Jadwal (2)
4. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (2)
5. Upayakan Data Terkini (2)
6. Organisasikan, Catat, Aksi, dan Arsipkan (3)
7. Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (1)
8. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah (1)
9. ASN PSDKP Produktif Kerja (1)
10. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (3)
11. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (2)
12. Gelorakan Gerakan hemat Energi (3)

Tabel. 3.42 Capaian IK 7.7"Nilai Implementasi Program Budaya Kerja"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.07.7	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	-	-	23,18	23,19	73,58

Pada tahun 2024 capaian IK "Persentase Nilai Implementasi Program Budaya Kerja " sebesar 73,58 atau lebih dari target yang ditetapkan yakni 71 (Tabel 3.42). Berdasarkan nilai capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 dikarenakan nilai indikator capaian Tahun 2023 ditargetkan sebesar 23 sedangkan Tahun 2024 nilai yang ditargetkan sebesar 71 sehingga hal ini juga menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah. (Gambar 24).

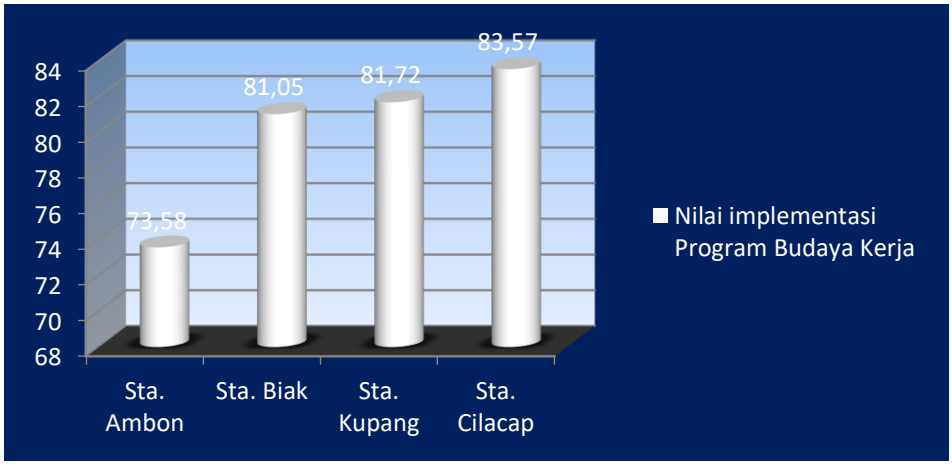

Gambar 24. Capaian Kinerja "Nilai Implementasi Program Budaya Kerja" lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP"

Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT PSDKP (Biak, Kupang dan Cilacap) dapat tercapai sesuai melebihi dari target yang ditetapkan (Gambar 3.20).

18. Capaian IK. 7.8 "Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup Stasiun PSDKP Ambon"

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan

baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Kelompok inovasi: umum, khusus.

Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%). Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adapatabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%) . Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi;selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan.

Tabel. 3.43 Capaian IK 7.7 "Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup Stasiun PSDKP Ambon"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.07.8	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup Stasiun PSDKP Ambon	-	-	1	1	1

Pada tahun 2024 capaian IK "Persentase Inovasi yang dihasilkan " sebesar 100% yakni 1 Inovasi yaitu Aplikasi AMANDAR. Berdasarkan nilai capaian tersebut dapat dikatakan hasil capaian Tahun 2024 sama dengan capaian Tahun 2023 dan 2022 sehingga hal ini juga menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah. Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100% dengan jumlah inovasi masing-masing UPT yaitu 1 Inovasi.(Gambar 25)

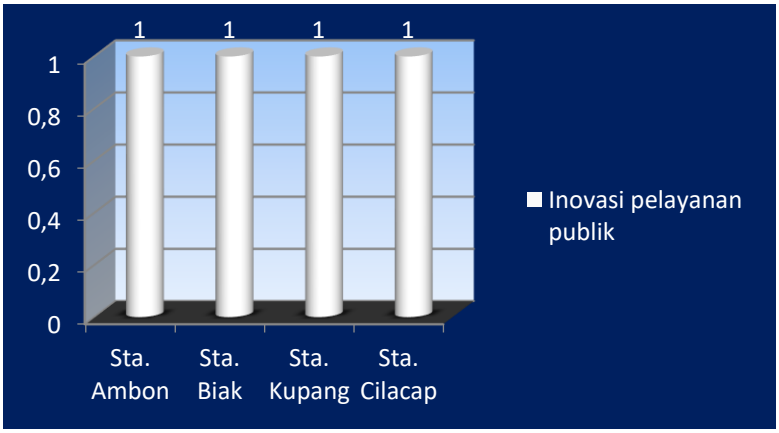

Gambar 25. Capaian Kinerja "Inovasi Pelayanan Publik" lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP"

19. Capaian IK 7.9 "Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon"

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Stasiun PSDKP Ambon adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Ambon. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Ambon, yaitu Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) dengan nilai capaian 92,95.

Tabel. 3.44 Capaian IK 7.9"Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.07.9	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon	92,21	91,37	90,87	88,5	96,3

Pada tahun 2024 capaian IK "Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon " sebesar 96,3,58 atau lebih dari target yang ditetapkan. Berdasarkan nilai capaian tersebut dapat dikatakan bahwa nilai capaian Tahun 2024 ini lebih tinggi dari Tahun sebelumnya (Tabel 3.44).

Seluruh pencapaian kegiatan yang dilakukan pada IKU ini tidak terlepas dari peran serta Pengawas Perikanan maupun petugas pelayanan publik Stasiun PSDKP Ambon dalam mengedepankan budaya pelayanan prima. IK ini merupakan indikator kinerja yang tetapkan terhadap seluruh UPT Direktorat Jenderal PSDKP, berdasarkan perbandingan dengan beberapa UPT lainnya, dapat dilihat bahwa,

capaian IK Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna Layanan Publik lingkup DITJEN PSDKP mampu mencapai nilai capaian lebih dari 80 (Gambar 26).

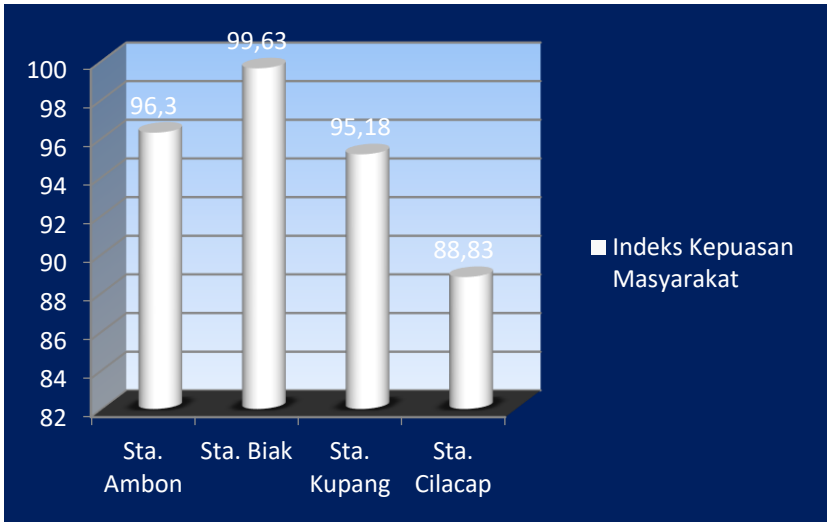

Gambar 26. Capaian Kinerja" Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon"

20. IKU 7.10 "Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon"

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV;
- Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

Tabel 3.45. Capaian IK 7.10 "Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.07.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	98,05	97,08	-	121,67	122,5

Pada Tahun 2024 ini capaian IK 7.10 “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon” tercapai melebihi dengan target yang ditetapkan dengan nilai capaian 122,5 dari target yang ditetapkan 94.

IK ini merupakan indikator kinerja manajerial yang ditargetkan kepada seluruh UPT lingkup DITJEN PSDKP. Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa meskipun nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon meningkat dibandingkan dari Tahun 2023, namun nilai capaian ini lebih rendah dari UPT lainnya, hal ini mengacu pada bitrix pegawai yang mempengaruhi maksimalnya nilai perhitungan, sehingga menjadi catatan perbaikan untuk Tahun depan agar dapat lebih ditingkatkan (Gambar 27).

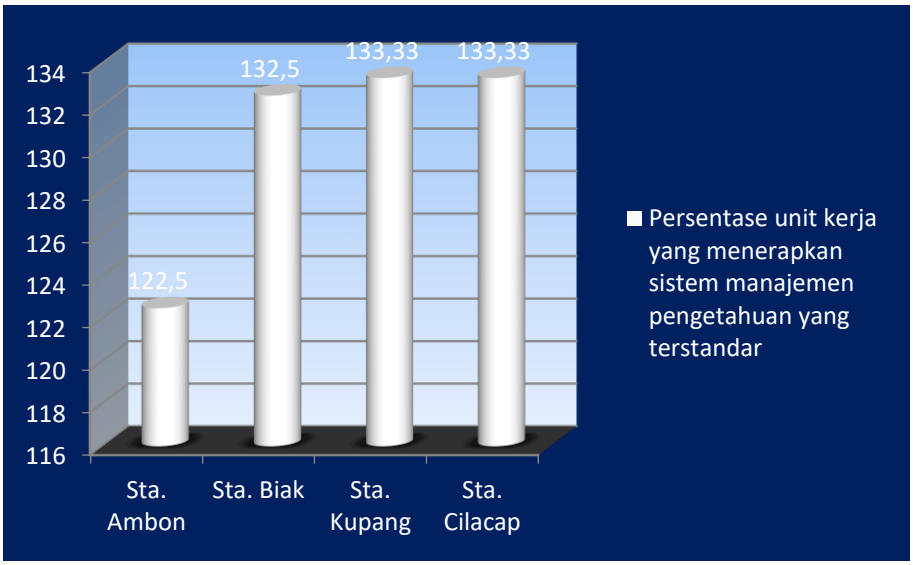

Gambar 27. Capaian Kinerja “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT DITJEN PSDKP”

21. IKU 7.11 “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada V. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024;

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;dan
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Tabel 3.46. Capaian IK 7.11 "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.07.11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	-	100	100	100	95

Pada tahun 2024 capaian IK 7.11 "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon" sebesar 95 dari target yang ditetapkan yakni 80 (Tabel). Berdasarkan nilai capaian tersebut jika disandingkan dengan dengan capaian Tahun 2021,2022 dan 2023 maka, capaian IK ini mengalami penurunan. Hal ini juga menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah. (Gambar 27).

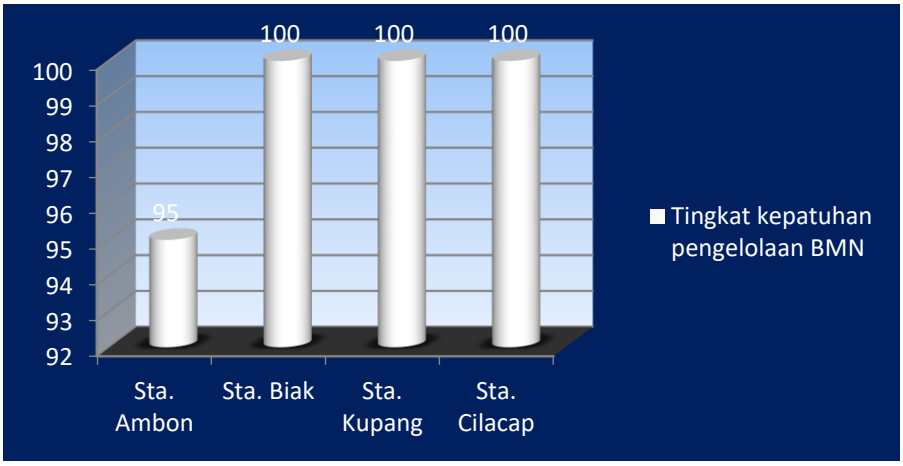

Gambar 28. Capaian Kinerja "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon" lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

IK ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan kepada seluruh UPT lingkup DITJEN PSDKP. Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon lebih rendah dari UPT lainnya, sehingga hal ini menjadi catatan untuk Tahun depan agar dapat lebih ditingkatkan (Gambar 19).

22. IKU 7.12 "Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon"

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada V. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%); 3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
3. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Tabel 3.47. Capaian Kinerja IK 7.12"Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.07.12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	-	92,15	100	100	100

Pada Tahun 2024 capaian IK "Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon" sebesar 100 dari target yang ditetapkan yakni 80. Berdasarkan nilai capaian tersebut jika disandingkan dengan dengan capaian tahun 2021, 2022 dan 2023 maka dapat dikatakan bahwa IK ini dapat dipertahankan capaiannya. IK ini juga menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah. (Gambar 28).

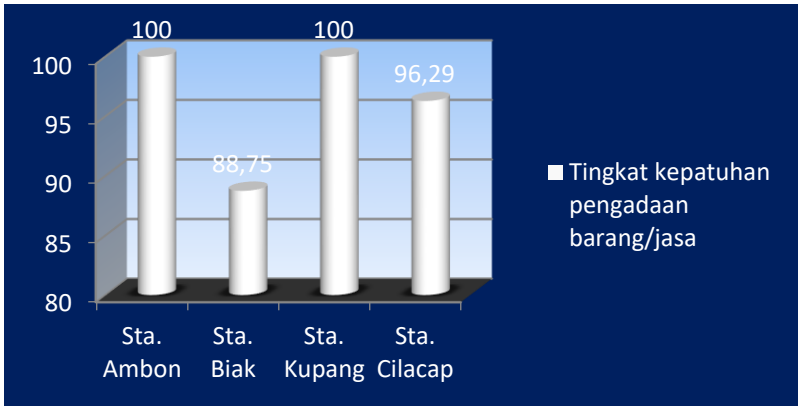

Gambar 29. Capaian Kinerja "Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP"

IK ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan kepada seluruh UPT lingkup DITJEN PSDKP. Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai capaian seluruh UPT PSDKP (Cilacap, Biak dan Kupang) melebihi dari target yang ditetapkan (Gambar 19).

23. IKU 7.13 "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon "

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Target IKPA Tahun 2023 sebesar 89.00 (nilai). Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain :

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95;
2. Baik, apabila 89 ≤ nilai IKPA > 95;
3. Cukup, apabila 70 ≤ nilai IKPA < 89; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA >70

Tabel 3.48. Capaian Kinerja IK 7.13"Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.07.13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	97,59	92,26	93,65	92,42	88,4

Pada Tahun 2024 capaian IK 7.13“Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon” sebesar 88,4 dari target yang ditetapkan yakni 93.76 (Tabel 3.45). Berdasarkan nilai capaian tersebut jika disandingkan dengan dengan capaian tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 maka, capaian IK ini mengalami penurunan, hal ini dikarenakan rendahnya penyerapan anggaran yang merupakan anggaran PNBP, dan deviasi pada Halaman III DIPA. (Gambar 29).

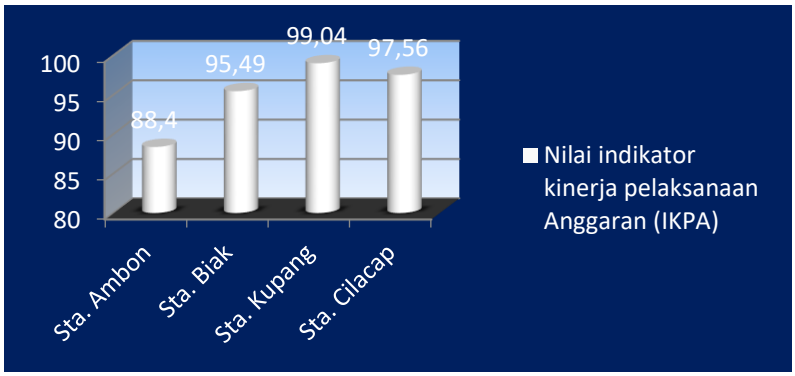

Gambar 30. Capaian Kinerja ““Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

IK ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan kepada seluruh UPT lingkup DITJEN PSDKP. Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon lebih rendah dari UPT lainnya, sehingga hal ini menjadi catatan Tahun depan untuk ditingkatkan dengan cara melakukan optimalisasi penyerapan anggaran, dan memastikan deviasi antara penyerapan dengan rencana Halaman III DIPA tidak melebihi 5% dalam suatu triwulan.

24. IKU 7.14 “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program

Kernen terian / Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah. Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU NKA :

a. Pengukuran capain IKU NKA dilakukan pada Semester II (Akhir Tahun)

b. Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan

• Target NKA Level I Tahun 2023 sebesar 86.00 (nilai)

• Target NKA Level II Tahun 2023 sebesar 82.00 (nilai)

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 - 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60; dan
5. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Tabel 3.49. Capaian Kinerja"Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon"

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKS.07.14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon		86,9	86,62	87,67	93,99

Pada tahun 2024 capaian IKM 24 **"**Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon" sebesar 93,99 dari target yang ditetapkan yakni 71 (Tabel 3.32). Berdasarkan nilai capaian tersebut jika disandingkan dengan dengan capaian tahun 2020, 2021 dan 2022 maka, capaian IK ini mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini juga menjadi tolak ukur untuk pencapaian target jangka menengah. (Gambar 30).

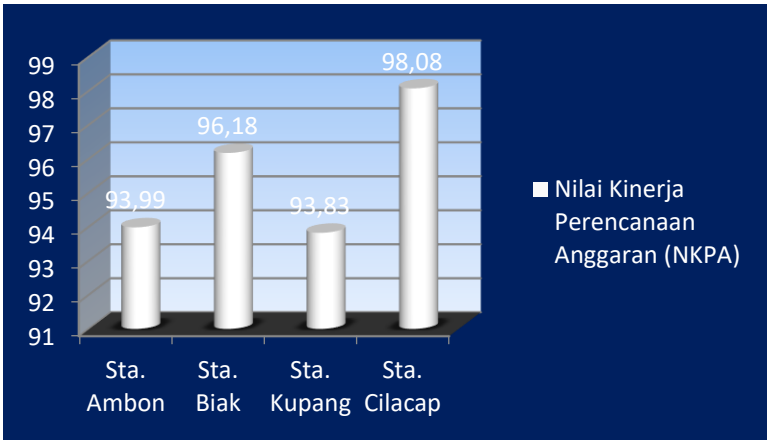

Gambar 31. Capaian Kinerja "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP"

Jika dibandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran sampai dengan Tahun 2024 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sebesar Rp. 23.392.351.831 (*Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)* atau 79,48% dari total yang dianggarkan Rp. 31.947.091.000,- (*Tiga Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)*. Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.50. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon pada Tahun 2024

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2350	Pemantauan dan Operasi Armada Infrastruktur Pengawasan	17,254,251,000	10,805,611,043	62.63
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	206,520,000	183,428,297	88.82
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	931.500.000	929,200,646	99.75
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	688,680,000	663,109,358	96.29
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	12.866.140.000	12,811,002,487	99.57
Total		**31,947,091.000**	**23.392.351.831**	**79,48%**

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran PSDKP Ambon yang tertuang dalam perjanjian kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil capaian kinerja sasaran PSDKP Ambon yang tertuang dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 didukung dengan tersedianya data dan informasi bidang pengawasan sumber daya kelautan yang diperlukan sebagai *base line* pengawasan serta digunakan data dukung capaian;
2. Nilai Capaian kinerja Stasiun PSDKP Ambon pada Tahun 2024 sebesar 105,00%, dengan kategori Baik. Hal ini didukung dengan tercapainya IKU dan IK Stasiun PSDKP Ambon; dan
3. Nilai capaian anggaran Stasiun PSDKP Ambon tahun 2024 dalam mendukung tercapainya kegiatan Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024 yakni Rp. 23.392.351.831 (*Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)* atau 79,48% atau 83.03% dari total yang dianggarkan Rp. 31.947.091.000,- (*Tiga Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)*.

B. Saran

Berdasarkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024 telah tercapai dengan kategori Baik, namun ada beberapa hal terkait nilai capaian yang masih rendah dan perlu ditingkatkan pada Tahun Depan yakni :

1. Meningkatkan capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon ;
2. Meningkatkan capaian kinerja Kapal Pengawas khususnya pada target Jumlah Kapal Perikanan yang diperiksa;
3. Meningkatkan capaian kinerja presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon khususnya dalam pengisian atau postingan Btrix Ketua Tim Kerja maupun para pegawai.

C. Rekomendasi

1. Melakukan konsultasi dengan Sesdit PSDKP terkait realisasi anggaran PNBP;
2. Melaksanakan monitoring terkait capaian pemeriksaan Kapal Ikan Indonesia yang diperiksa pada Gelar Operasi Kapal Pengawas HIU 13;
3. Melaksanakan monitoring terhadap postingan yang dilakukan oleh masing-masing Ketua Tim Kerja pada plattform Portal Collaboration Office (https://portal.kkp.go.id)
4. Melaksanakan kegiatan penyerahan TDKP Nelayan di Kawasan Konservasi Taman Wisata Laut Banda.

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Awal

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martin Yermias Luhulima
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Ambon

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Adin Nurawaluddin
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon

Martin Yermias Luhulima

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	IK.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	81
SK. 2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	IK.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	91
		IK.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	91
		IK.2.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100%
SK. 3	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	IK.3.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
SK. 4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	IK.4.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
SK. 5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketetuan	IK.5.1	Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100%
		IK.5.2	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100%
SK. 6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	IK.6.1	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		IK.6.2	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
SK. 7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	IK.7.1	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
SK. 8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IK.8.1	Nilai minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	75
		IK.8.2	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	100
		IK.8.3	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	70
		IK.8.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	82
		IK.8.5	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Ambon	84
		IK.8.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80%
		IK.8.7	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21
		IK.8.8	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Inovasi)	1
		IK.8.9	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80
		IK.8.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	94%
		IK.8.11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80%
		IK.8.12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80%
		IK.8.13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	93,76
		IK.8.14	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	82

"bekerja dengan integritas dan totalitas"

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	17.462.819.000
2.	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	284.500.000
3.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	991.500.000
4.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	720.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	12.339.909.000
	Total Anggaran Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024	**31.818.728.000**

Jakarta, 24 Januari 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon

Martin Yermias Luhulima

"bekerja dengan integritas dan totalitas"

- Perjanjian Kinerja Revisi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.dipsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martin Yeremias Luhulima

Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Ambon
Pung Nugroho Saksono	Martin Yeremias Luhulima

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
SK 1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK 2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2. Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		3. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91
		4. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK 3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketetuan	5. Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	60
		6. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK 4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	100
SK 5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	9. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Nilai)	100
SK 6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	11. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	80
		12. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Indeks)	80
SK 7	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	15. Nilai Pengawasan Kaersipan Internal lingkup Ditjen PSDKP	70
		16. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Lingkup Stasiun PSDKPAmbon (indeks)	80
		17. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai)	75
		18. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		19. Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (indeks)	82
		20. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai)	84
		21. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		22. Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai)	70
		23. Inovasi yang dihasilkan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (inovasi)	1
		24. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	94
		25. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	77,5
		26. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	77,5
		27. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai)	93,76
		28. Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (nilai)	71

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	991.500.000
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	720.000.000
Kegiatan 3	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	17.482.819.000
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	206.520.000
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	12.951.909.000
Total Anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Ambon		**32.352.748.000**

Jakarta, Desember 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Ambon
Pung Nugroho Saksono	Martin Yeremias Luhulima

- Penghargaan yang diterima Unite Kerja Stasiun PSDKP Ambon di Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Satker Stasiun PSDKP Ambon medapat penghargaan “Satker dengan Transaksi Terbanyak Periode Semester Tahun 2024” dalam acara Rapat Koordinasi Monev Pelaksanaan Anggaran Semester I dan Langkah Strategi Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2024 di KPPN Ambon.